



**FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP
PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DI
KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

Oleh:

HANANTO ARIF ROHMAN

NIM. 080810101051

ILMU EKONOMI STUDI PEMBANGUNAN

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS JEMBER

2015



**FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP
PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DI
KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ekonomi Pembangunan (S1) dan
mencapai gelar Sarjana Ekonomi

Oleh:

HANANTO ARIF ROHMAN

NIM. 080810101051

ILMU EKONOMI STUDI PEMBANGUNAN

FAKULTAS EKONOMI

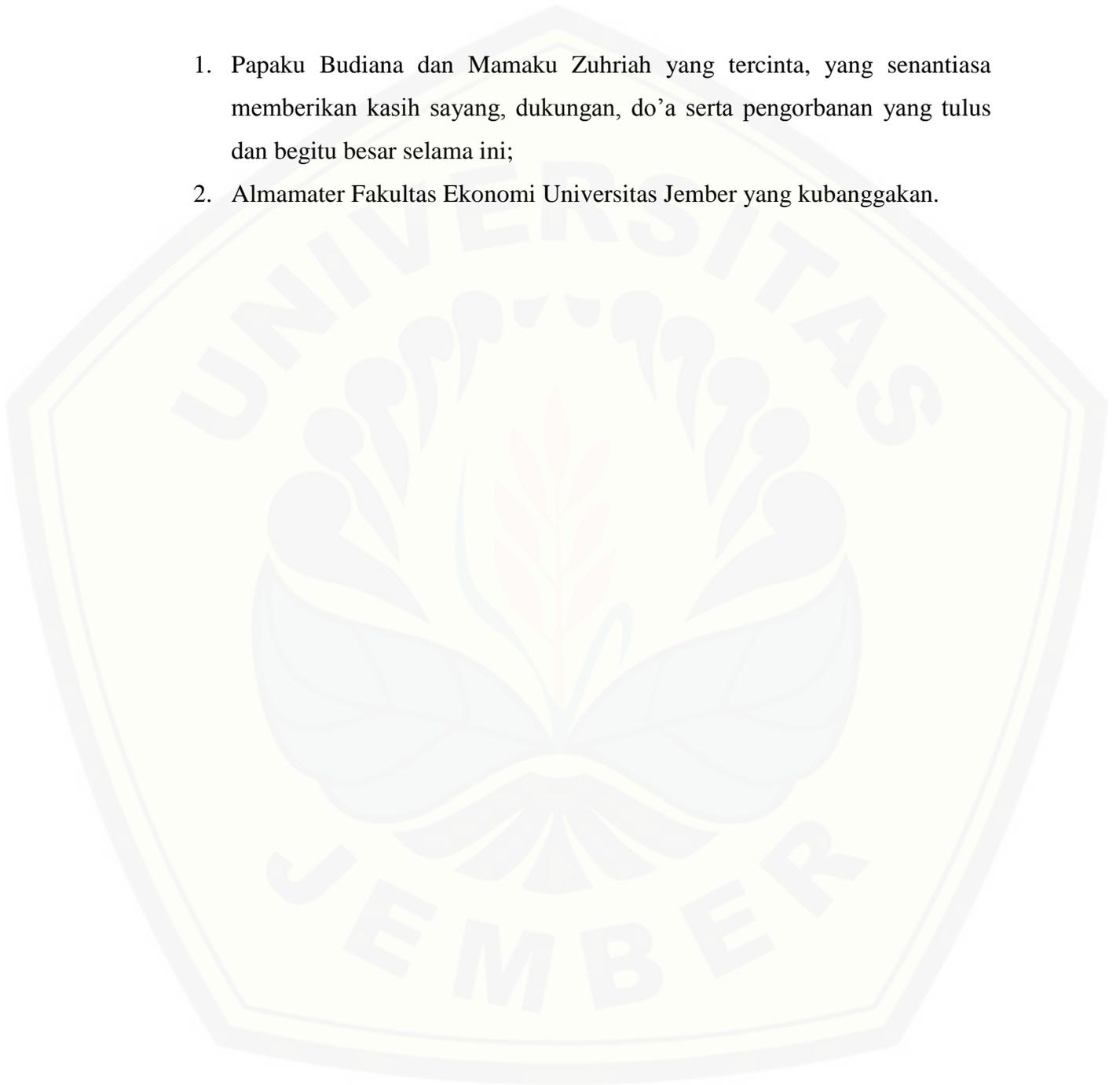
UNIVERSITAS JEMBER

2015

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Papaku Budiana dan Mamaku Zuhriah yang tercinta, yang senantiasa memberikan kasih sayang, dukungan, do'a serta pengorbanan yang tulus dan begitu besar selama ini;
2. Almamater Fakultas Ekonomi Universitas Jember yang kubanggakan.



Motto

Saya mau JADI Sarjana & DAPAT Sarjana

(Anonim)

Saya mau SUKSES, karena SUKSES itu menyenangkan

(penulis)

Membuat Cita-cita menjadi kenyataan itu harus ikhtiar & tawakal dan satu hal yg
gak boleh lupa, SABAR...

(Babe)



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hananto Arif Rohman

NIM : 080810101051

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: "*Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Paak bumu Dan Bangunan (PBB) Di Kabupaten Jember*" adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang telah disebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, Januari 2015

Yang menyatakan,

Hananto Arif Rohman

NIM. 080810101051



SKRIPSI

**FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP
PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DI
KABUPATEN JEMBER**

Oleh

Hananto Arif Rohman

NIM 080810101051

Pembimbing

Dosen Pembimbing I : Dr. Rafael Purতোমো., M.Si.

Dosen Pembimbing II : Dra. Anifatul Hanim, M.Si

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Penerimaan
Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Kabupaten Jember
Nama : Hananto Arif Rohman
Nim : 080810101051
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Konsentrasi : Regional
Disetujui Tanggal : 17 desember 2014

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Rafael Purতোমো., M.Si.
NIP 19581024 198803 1 001

Dra. Anifatul Hanım, M.Si
NIP 19650730 199103 2 001

Mengetahui,
Ketua Jurusan

Dr. Sebastiana Viphındrartin, M.Kes
Nip. 196411081989022001

**PENGESAHAN
JUDUL SKRIPSI**

**FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP
PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DI
KABUPATEN JEMBER**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Hananto Arif Rohman

NIM : 080810101051

Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

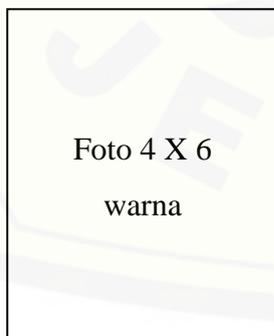
telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal:

.....

dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

1. Ketua : (.....)
(NIP)
2. Sekretaris : (.....)
(NIP)
3. Anggota : (.....)
(NIP)



Mengetahui/Menyetujui,
Universitas Jember
Fakultas Ekonomi
Dekan,

Dr. H. Moch. Fathorrozi, M. Si
NIP. 196 306 141 99002 1001

ABSTRAKSI

Skripsi Ini berjudul “Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Kabupaten Jember”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah jumlah penduduk, PDR berpengaruh terhadap pajak bumi dan bangunan (PBB) di Kabupaten Jember.

Untuk mengukur besar pengaruh jumlah penduduk, PDRB terhadap Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Jember digunakan analisis regresi linier berganda.

Hasil analisis regresi linier berganda secara bersama-sama menunjukkan bahwa variabel jumlah penduduk (x_1), pdrb (x_2), mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pajak bumi dan bangunan dalam kurun waktu minimal 5 tahun di Kabupaten Jember. Hal tersebut dapat dibuktikan dari hasil estimasi yang menunjukkan nilai probabilitas Tabel distribusi F dicari pada $\alpha = 5\%$, dengan derajat kebebasan (df) df_1 atau $3-1 = 2$, dan df_2 $n-k-1$ atau $31-2-1 = 28$. Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda (dalam hal ini untuk menguji pengaruh secara simultan) diperoleh hasil, yaitu bahwa $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($88,736 > 3,34$) dan signifikansi ($0,000 < 0,05$), maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya variabel jumlah penduduk dan PDRB secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PBB di Kabupaten Jember.

PRAKATA

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DI KABUPATEN JEMBER”.

Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Ekonomi dan Pembangunan dan guna mencapai Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

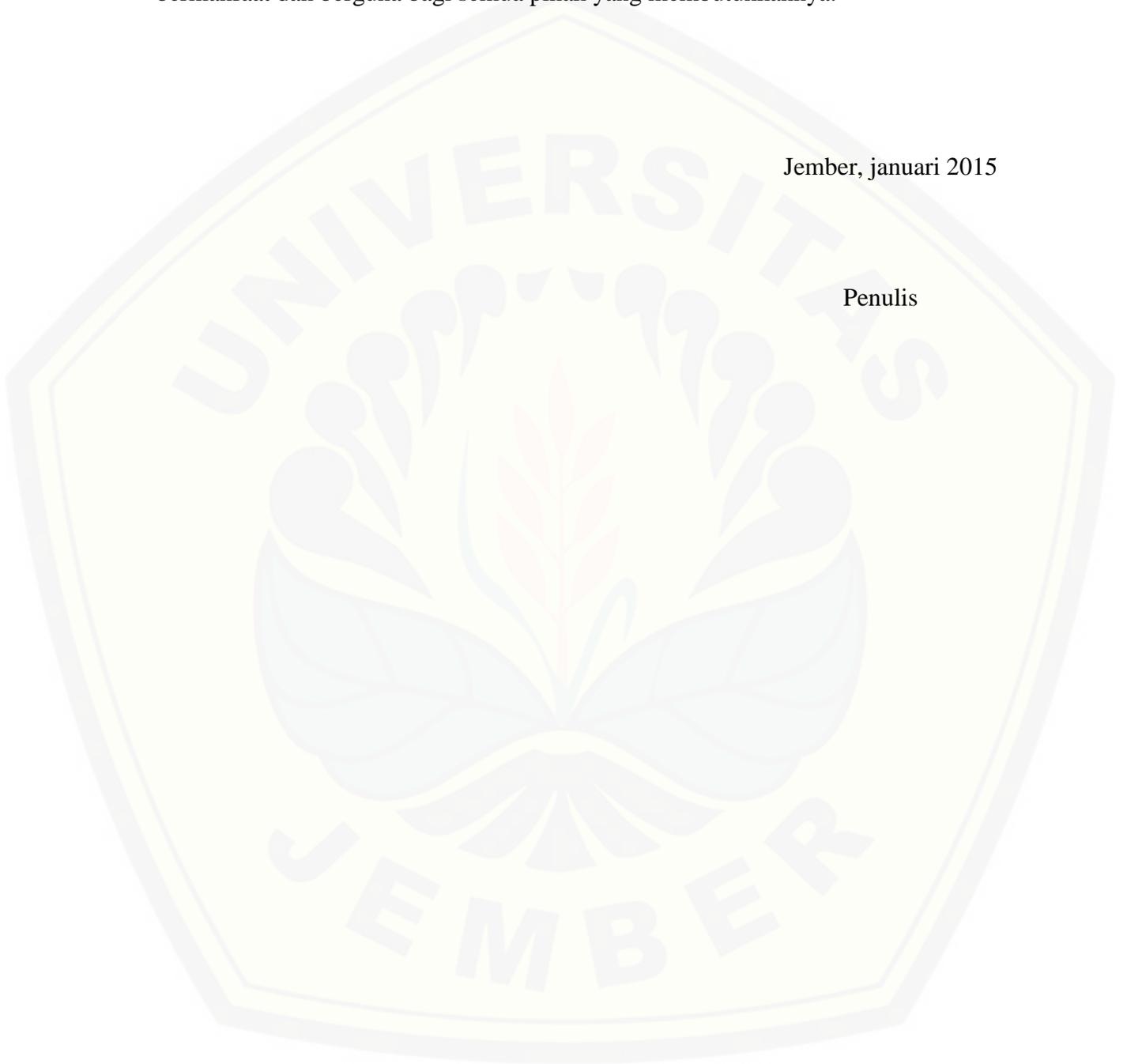
Penulis pada kesempatan ini ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Bapak Dr. Rafael Purto., M.Si. dan Ibu Anifatul Hanim, Dra. M.Si, selaku Dosen Pembimbing skripsi yang dengan tulus dan ikhlas memberi bimbingan dan arahan sehingga penulis merasa tenang dan percaya diri dalam penyelesaian skripsi ini;
2. Bapak Dr. H. Moch. Fathorrozi, M. Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Jember, yang telah memberikan dorongan dan motivasi selama penulis belajar di Fakultas Ekonomi Universitas Jember;
3. Para guru di SDN bulak banteng lor surabaya, SMP Negeri 7 surabaya, SMA Negeri 19 surabaya, dan dosen-dosen di Fakultas Ekonomi Jember.
4. Mamaku Zuhriah, terima kasih karena telah melahirkanku dan membesarkanku. Papaku Budiana terima kasih atas nasehat dan *sponsorshipnya*. Adek – adekku Lukman hakim ardian dan Rizki setiana fitri, terima kasih.
5. Segenap mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Jember angkatan 2008 yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Makasi atas kebersamaannya selama penulis belajar di Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Semoga segala amal baik yang telah mereka berikan dengan tulus dan ikhlas pada penulis, mendapat balasan dari Allah SWT. Akhir kata, pada kesempatan ini penulis sisipkan suatu harapan mudah – mudahan skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Jember, januari 2015

Penulis



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN PEMBIMBING	vi
HALAMAN TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	vii
HALAMAN PENGESAHAN	viii
ABSTRAKSI	ix
PRAKATA	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Peneliti	4
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1 Landasan Teori	5
2.1.1 Pengertian pajak.....	5
2.1.2 Fungsi Pajak	6
2.1.3 Pajak Bumi Dan Bangunan.....	7
2.1.3.1 Pengertian PBB	7
2.1.3.2 Subjek PBB	7
2.1.3.3 Objek PBB	8

2.1.4	Faktor-Faktor Yang Mmpengaruhi Pajak Bumi Dan Bangunan	10
2.1.4.1	PDRB	10
2.1.5	Jumlah Penduduk.....	10
2.2	Tinjauan Penelitian Sebelumnya	12
2.3	Kerangka Konseptual	14
2.4	Hipotesis.....	15
BAB 3.	METODE PENELITIAN	16
3.1	Tempat Penelitian	16
3.2	Jenis Dan Sumber Data	16
3.3	Teknik Pengumpulan Data.....	17
3.4	Operational Variabel.....	18
3.5	Populasi Dan Tempat	20
3.5.1	Pertumbuhan Penduduk.....	20
3.5.2	Persebaran Dan Kepadatan	20
3.6	Metode Penelitian	24
3.6.1	Metode Yang Di Gunakan.....	24
3.7.3	Analisis Data	24
3.6.2.1	Uji Asumsi Klasik	24
3.6.2.2	Analisis Deskriptif Statistik.....	27
3.6.2.3	Analisis Regresi.....	27
3.6.2.4	Uji Hipotesis.....	28
BAB 4.	HASIL DAN PEMBAHASAN	29
4.1	Gambaran Umum	29
4.1.1	Letak Geografis Penelitian	29
4.1.2	Kondisi Demografi Kabupaten Jember	32
4.1.3	Keadaan Ekonomi Kabupaten Jember	37
4.1.4	Penerimaan Pajak Bumi Bangunan.....	46
4.2	Analisis Data	48
4.2.1	Uji Asumsi Klasik	48
4.2.2	Analisis Deskriptif Statistik.....	52

4.2.3	Analisis Regresi Linear Berganda.....	53
4.2.4	Uji Hipotesis.....	54
4.2.4.1	Uji t.....	54
4.2.4.2	Uji F.....	55
4.2.4.3	Koefisien Determinasi.....	55
4.3	Pembahasan	55
4.3.1	Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.....	56
4.3.2	Pengaruh PDRB Terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.....	57
4.4	Keterbatasan Penelitian	58
BAB 5.	KESIMPULAN DAN SARAN	59
5.1	Kesimpulan	59
5.2	Saran	59

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk melaksanakan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat di daerahnya. Untuk mewujudkan tugasnya tersebut maka pemerintah daerah harus memiliki sumber keuangan yang cukup dan memadai karena untuk pelaksanaan pembangunan daerah itu di perlukan biaya yang tidak sedikit. Salah satu sumber keuangan untuk penyelenggaraan pembangunan daerah tersebut adalah dana perimbangan yang mana salah satunya merupakan dana bagi hasil pajak yang bersumber dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Terdapat bermacam-macam definisi tentang “pajak” yang dikemukakan oleh para ahli diantaranya adalah :

Menurut Mohammad Zain (2006:312) bahwa : “Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang di gunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah”.

Menurut Andriani mengartikan pajak, yang kemudian dikutip oleh Santoso Brotodihardjo (2003:2) : “Pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintah”.

Salah satu pajak yang menjadi potensi sumber pendapatan daerah kita yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang masuk dalam kategori Pajak Daerah. Sejak tahun 2011 penarikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dilimpahkan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri nomor: 213/pmk.07/2010, nomor: 58 tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

yaitu iuran yang dikenakan terhadap orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak, memiliki, menguasai dan memperoleh manfaat dari bumi dan bangunan (Rahman, 2011:41).

Pemerintah Daerah setiap tahunnya mempunyai target dalam penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai sumber pendapatan daerah, tetapi tidak selalu target tersebut terealisasi dengan sempurna. Terkadang juga realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) jauh dibawah target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Menurut undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang menjadi objek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah Bumi dan Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Yang dimaksud dengan Bumi adalah permukaan dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah, perairan, pedalaman serta laut Wilayah Indonesia. Sedangkan yang dimaksud dengan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan atau perairan-perairan. Disamping itu yang disebut subjek pajak bumi dan bangunan adalah badan yang secara nyata :

- a. Mempunyai suatu hak atas bumi dan atau mempunyai manfaat atas bumi.
- b. Memiliki, menguasai dan akan memperoleh manfaat atas bangunan.

Tubagus (1992) menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak antara lain: Kapasitas Administrasi yang tercermin dari jumlah penagihan, Jumlah Penetapan yang berlandaskan pada Perangkat UU dan Peraturan Pelaksanaannya dan Jumlah penduduk yang berlandaskan pada masyarakat, khususnya Wajib Pajak dan lingkungannya. Dengan kata lain bahwa faktor-faktor keberhasilan perpajakan adalah faktor administrasi Negara dan pajak, faktor undang-undang dan peraturan pelaksanaan perpajakan, factor kebijakan pemerintah, dan faktor masyarakat, khususnya wajib pajak (WP) (Faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan perpajakan adalah: Tax law; Tax Administration, Tax Policy, dan Tax payer). Dari hasil penelitian Insukrindo dkk (1994) menemukan bahwa perkembangan pernbangunan di

wilayah setempat akan menaikkan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) atau yang sebelumnya tidak dikategorikan sebagai obyek pajak, pada akhirnya menjadi obyek pajak PBB.

Kenneth Davey (1995) dalam Anton Sitanggang (2001) menyatakan bahwa Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB), jumlah penduduk, dan tingkat inflasi berpengaruh terhadap penerimaan PBB. Dari beberapa pendapat tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan PBB dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penerimaan PBB adalah: Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita, jumlah penduduk, dan inflasi (Kenneth Davey, 1995). Pengetahuan tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penerimaan PBB merupakan input penting bagi Direktorat Jendral Pajak bidang PBB dan instansi lain yang terikat, sehingga mempunyai peranan yang penting didalam upaya peningkatan keberhasilan penerimaan perpajakan (khususnya PBB).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian, yang hasilnya ditulis dalam bentuk skripsi dengan judul “FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DI KABUPATEN JEMBER”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka penulis mengidentifikasi factor-faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan pajak sebagai berikut:

- a. Apakah jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PBB di Kabupaten Jember?
- b. Apakah Produk Domestik Regional Bruto per Kapita berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PBB di Kabupaten Jember?

Pada dasarnya terdapat banyak faktor yang mempengaruhi penerimaan PBB, diantara faktor-faktor tersebut yang akan diadakan penelitian adalah "Jumlah penduduk, dan PDRB per Kapita". Karena faktor-faktor tersebut

mempunyai peranan yang penting dalam meningkatkan penerimaan PBB, dan masih sedikit diadakan penelitian.

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah diatas yang dijabarkan dalam pertanyaan penelitian, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk menganalisis ada tidaknya pengaruh besarnya jumlah penduduk terhadap penerimaan PBB di Kabupaten Jember;
- b. Untuk menganalisis ada tidaknya pengaruh PDRB per Kapita terhadap penerimaan PBB di Kabupaten Jember.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori, khususnya yang berkaitan. Selain itu temuan dari penelitian ini dapat memberikan masukan bagi Pemerintah Daerah, khususnya aparat perpajakan dalam merealisasikan kebijakan Otonomi Daerah.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teoritis

2.1.1 Pengertian Pajak

Menurut Mohammad Zain (2006:312) bahwa: “Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah”.

Menurut Andriani mengartikan pajak, yang kemudian dikutip oleh Santoso Brotodihardjo (2003:2) bahwa: “Pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintah”.

Menurut Mardiasmo (2004:1): “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur :

- a. Pajak merupakan iuran dari rakyat kepada kas Negara yang berupa uang (bukan barang)
- b. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya.
- c. Dalam pembayarannya pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh Pemerintah.
- d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara , yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.1.2 Jenis Pajak

Sesuai dengan asas pemungutan pajak, maka di Indonesia ditetapkan berbagai pengelompokan pajak agar dapat membedakan antara pajak yang satu dengan pajak yang lain. Jenis pajak dapat digolongkan menjadi 3 macam, yaitu (Mardiasmo) :

a. Menurut Golongannya:

- 1) Pajak Langsung Adalah pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
- 2) Pajak Tidak Langsung Adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain .

b. Menurut Sifatnya:

- 1) Pajak Subjektif Adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak.
- 2) Pajak Objektif Adalah pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak .

c. Menurut Lembaga Pemungutnya

- 1) Pajak Pusat Adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara.
- 2) Pajak Daerah Adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah .

2.1.2 Fungsi Pajak

Definisi atau pengertian fungsi pajak menurut Mardiasmo, dalam buku yang berjudul Perpajakan. Menyatakan bahwa fungsi pajak adalah:

- a) Fungsi *Budgetair*, yaitu pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
- b) Dua fungsi Mengatur (*Regulerend*), yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

2. 1.3 Pajak Bumi dan Bangunan

2. 1.3.1. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Soemitro (2006:1) Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas harta tidak bergerak, oleh sebab itu yang dipentingkan adalah objeknya dan oleh karena itu keadaan atau status orang atau badan yang dijadikan subjek tidak penting dan tidak mempengaruhi besarnya pajak, maka disebut juga pajak objektif. Pajak Bumi dan Bangunan adalah salah satu pajak pusat yang merupakan sumber penerimaan Negara yang sebaagian besar hasilnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah untuk kepentingan masyarakat daerah tempat objek pajak. Maka dapat disimpulkan bahwa pengertian PBB adalah iuran yang dikenakan terhadap orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak, memiliki, menguasai dan memperoleh manfaat dari bumi dan bangunan.

Namun sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 28/2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang baru, Pajak Bumi dan Bangunan kini merupakan Pajak Daerah yang 100% penerimaannya akan diterima oleh Daerah yang bersangkutan. Dimana selama ini PBB merupakan pajak pusat, namun hampir seluruh penerimaannya diserahkan kepada daerah. Untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, khusus PBB sektor perdesaan dan perkotaan dialihkan menjadi pajak daerah. Sedangkan PBB sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan masih merupakan pajak pusat. Dengan dijadikannya PBB Perdesaan dan Perkotaan menjadi pajak daerah, maka penerimaan jenis pajak ini akan diperhitungkan sebagai pendapatan asli daerah (PAD).

2.1.3.2 Subjek Pajak Bumi dan Bangunan

Subjek Pajak Bumi dan Bangunan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata :

- a. Mempunyai suatu hak atas bumi;
- b. Memperoleh manfaat atas bumi;
- c. Memiliki, menguasai atas bangunan;
- d. Memperoleh manfaat atas bangunan.

2.1.3.3 Objek Pajak Bumi dan Bangunan

Ditinjau dari jenis pajaknya, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan. Bumi merupakan permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya, permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pendalaman (termasuk rawa-rawa dan tambak perairan) serta laut wilayah Republik Indonesia. Menurut Mardiasmo (2002:271) dalam menentukan klasifikasi bumi dan bangunan, Menteri Keuangan harus memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut:

a. Bumi/tanah:

- 1) Letak;
- 2) Peruntukan;
- 3) Pemanfaatan;
- 4) Kondisi.

b. Bangunan:

- 1) Bahan yang digunakan;
- 2) Rekayasa;
- 3) Letak;
- 4) Kondisi lingkungan dan lain-lain.

Sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan (Waluyo,2005:144). Berdasarkan UU No 28 Tahun 2009 Pasal 77 ayat (1), yang menjadi Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan , perhutanan , dan pertambangan.

Selanjutnya penjelasan dari Pasal 77 Ayat (2), menguraikan lebih lanjut mengenai pengertian bangunan yang menjadi objek PBB adalah:

- a. Jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks suatu bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, dan lain-lain yang merupakan satu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut;

- b. Jalan TOL;
- c. Kolam renang;
- d. Pagar mewah;
- e. Tempat olahraga;
- f. Galangan kapal, dermaga;
- g. Taman mewah;
- h. Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak, dan;
- i. Menara.

Dalam rangka memberikan manfaat kepada pemerintahan atau berupaya dalam pelaksanaan pemungutan PBB secara adil maka undang-undang memberikan kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk mengatur tentang klasifikasi objek pajak. yang dimaksud dengan klasifikasi objek bumi dan bangunan adalah pengelompokan bumi dan bangunan menurut nilai jualnya dan digunakan sebagai pedoman serta untuk memudahkan penghitungan pajak terhutang.

Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pasal 77 ayat (3) UU No 28 Tahun 2009 yaitu objek pajak yang :

- a. Digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;
- b. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, social, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
- c. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani oleh suatu hak;
- d. Digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsultan berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
- e. Digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan Menteri Keuangan.

Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) ditetapkan paling rendah sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib pajak. Dimana ketetapanannya di tambah 25 % dari hasil perhitungan PBB.

2.1.4 Faktor-Faktor yang mempengaruhi PBB

2.1.4.1 Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB)

Rochmat Soemitro (1989) dan Kenneth Davey (1995) dalam Anton Sitanggang menyatakan bahwa pemilik tanah pada umumnya memiliki kemampuan membayar pajak yang tinggi, oleh karenanya pemilik tanah dapat dijadikan ukuran, meski agak kasar mengenai kemampuan membayar pajak. Dalam teori elastisitasnya menyatakan bahwa PORB, jumlah penduduk, dan tingkat inflasi berpengaruh terhadap penerimaan PBB. Bahwa apabila PORB dan jumlah penduduk (yang menjadi Subyek Pajak) mengalami perubahan (kenaikan) sebesar 1%, maka penerimaan PBB akan mengalami perubahan sebesar jumlah persentase PDRB dibagi jumlah penduduk wilayah yang bersangkutan.

Elastisitas adalah kemampuan untuk menghasilkan tambahan pendapatan agar dapat menutup tuntutan yang sarna atas kenaikan pengeluaran pemerintah, dan dasar pengenaan pajaknya berkembang secara otomatis, misalnya bila harga-harga rneningkat, penduduk di suatu daerah berkembang dan pendapatan individu juga bertambah.

2.1.5 Jumlah Penduduk

Indonesia adalah Negara yang sedang berkembang yang mengalami ledakan Jumlah penduduk yang selalu mengaitkan kependudukan dengan pembangunan ekonomi. Akan tetapikedua hubungan tersebut tergantung pada sifat dan masalah kependudukan yang dihadapi oleh setiap Negara, dengan demikian tiap Negara atau daerah mempunyai masalah kependudukan yang khas dan potensi serta tantangan yang khas pula (Wirosardjono, 1988).

Jumlah penduduk oleh para perencana pembangunan dipandang sebagai asset modal besar pembangunan dan juga dipandang sebagai beban pembangunan.

Sebagai asset apabila dapat ditingkatkan kualitas maupun keahlian/ketrampilan sehingga akan meningkatkan produksi nasional. Jumlah penduduk yang besar akan menjadi beban jika struktur, persebaran, dan mutunya sedemikian rupa sehingga hanya menuntut pelayanan social yang tingkat produksinya rendah sehingga menjadi tanggungan penduduk yang bekerja secara efektif. (Widarjono 1999).

Thomas Robert Malthus (1766-1834) dalam bukunya *An essay on the principles of population* yaitu tingginya pertumbuhan penduduk akan mengurangi output perkapita jika tidak disertai dengan kenaikan input yang lain seperti modal dan adanya hukum tambahan hasil yang menurun (*diminishing return*) akan mengurangi pertumbuhan output. Pertumbuhan penduduk hanya akan mengakibatkan tambahnya pengangguran sehingga rasio ketergantungan (*dependency ratio*) akan tinggi selanjutnya akan menurunkan tabungan masyarakat.

Pandangan pesimistis Malthus berlawanan dengan ekonom klasik yang dipelopori Adam Smith (1776) bahwa pertumbuhan penduduk tinggi akan menaikkan output melalui penambahan tenaga kerja dan ekspansi pasar baik pasar dalam negeri maupun luar negeri. Pertumbuhan penduduk yang tinggi disertai perubahan teknologi akan mendorong tabungan dan juga penggunaan skala ekonomi didalam produksi.

Berdasarkan pemikiran klasik maka pertumbuhan penduduk akan mendorong perluasan investasi karena adanya kebutuhan perumahan yang semakin besar dan peningkatan kebutuhan umum lainnya (Irawan dan Suparmoko; 1997;46), hal tersebut akan mendorong harga tanah menjadi meningkat. Sebagaimana yang telah di teliti oleh Rultan 1961 dan Ottenman 1977 (dalam Yusriadi 1996) menemukan bahwa jumlah penduduk mempunyai pengaruh signifikan terhadap harga tanah. Henry Mannan (1992) meneliti tentang upaya-upaya meningkatkan penerimaan pajak, menemukan bahwa realisasi penerimaan pajak di palangkaraya dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk yaitu setiap pertumbuhan penduduk sebesar 1% maka penerimaan pajak daerah akan naik sebesar 0,0471%.

2.2 Tinjauan Penelitian Sebelumnya

- a. Mintarsih (2003), dengan tesis yang berjudul : “Faktor-Faktor yang mempengaruhi besaran Pajak Bumi dan Bangunan di Propinsi Daerah Tingkat 1 Jawa Tengah dengan variable bebas jumlah wajib pajak; luas lahan; tertib administrasi dengan jenis data kualitatif dan kuantitatif yang di olah dengan analisis regresi linier berganda.
- b. Sugeng Wibowo (2001), dalam penelitiannya yang berjudul : "Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi kelalaian membayar PBB dan faktor yang mempengaruhi penerimaan PBB di Kabupaten Pekalongan, Dengan variabel bebas jumlah luas lahan (X1); jumlah luas bangunan (X2); jumlah wajib pajak (X3); tertib administrasi (X4). Jenis data : kualitatif dan kuantitatif diolah dengan analisa Regresi berganda.
- c. Anton Sitanggung (2001); juga meneliti Tingkat Kepatuhan wajib pajak ditinjau dari sudut jumlah surat penagihan, jumlah wajib pajak terpilih dana pembangunan prasarana, dan Pendapatan Domestik Regional Bruto per kapita terhadap penerimaan PBB di Daerah Istimewa Yogyakarta, Penelitian ini menggunakan alat analisis Uji Regresi dan Korelasi dengan program SPSS, yang menyimpulkan bahwa faktor-faktor tingkat kepatuhan wajib pajak (jumlah surat penagihan, jumlah wajib pajak terpilih, dana pembangunan prasarana dan Pendapatan Domestik Bruto kapita berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Daerah Istimewa Yogyakarta.
- d. Muclis (2002) dalam penelitiannya yang berjudul "Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Realisasi Penerimaan PBB" (Studi Komparasi antara Kabupaten Brebes dan Kabupaten Tegal). Dengan variabel bebas antara lain: jumlah luas lahan tanah (Xj), jumlah luas bangunan (X2), jumlah wajib pajak (X3), tertib administrasi (X4). Metode pengolahan data dengan menggunakan Regresi Linier berganda dan uji beda struktur dengan Chow Test.

Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut ;

- a. Penerimaan PBB sangat dipengaruhi oleh luas lahan/tanah, luas bangunan, jumlah wajib pajak dan tertib administrasi.
- b. Bila luas lahan/tanah naik maka penerimaan PBB akan meningkat meskipun koefisien regresi = 0,392. Karena penguasaan luas tanah perkapita dari tahu ke tahun cenderung menurun. Hal ini sebagai akibat pertumbuhan penduduk, luas bangunan naik maka penerimaan PBB akan naik
- c. Wajib pajak dalam arti kuantitatif, naik maka penerimaan PBB akan naik.
- d. Koefisien variabel = 1,137. Hal ini merupakan andalan dimasa yang akan datang.
- e. Ketidak tertiban administrasi akan mempengaruhi penerimaan PBB dalam hal ini berkaitan dengan keakuratan data; tingkat kesalahan dalam penghitungannya.
- f. Hasil analisis uji beda melaporkan: Potensi dasar yang dimiliki (Tegal lebih berpotensi) dengan konstanta Kabupaten Tegal (13.735) dan Kabupaten Brebes (9,474). Tegal manajemen kurang sehingga tidak bisa memanfaatkan potensi yang ada. Sehingga pertumbuhan penerimaan lebih bagus Kabupaten Brebes dengan kata lain: mula-mula intersep Kabupaten Tegal tinggi, tetapi setelah berjalan lebih unggul Kabupaten Brebes.

Review penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel 2.1. berikut ini:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama (Tahun)	Judul Tesis/ Skripsi	Alat Analisis	Kesimpulan
1	Mintarsih (2003)	Faktor yang mempengaruhi besaran PBB di daerah tingkat 1 Jawa Tengah	Uji regresi linier berganda dengan SPSS, Uji beda structur dengan cow test	Faktor jumlah kepatuhan WP, jumlah surat WP, jumlah dana pembangunan, prasarana PDRB perkapita berpengaruh terhadap penerimaan PBB di DIY
2	Sugeng Wibowo (2001)	Faktor kelalaian membayar PBB dan penerimaan PBB	Analisis kualitatif, kuantitatif, uji regresi berganda	Peningkatan PBB dipengaruhi kesadaran WP dan keaktifan aparat.
3	Anton Sitanggang (2001)	Tingkat kepatuhan WP ditinjau dari jumlah surat penagihan, jumlah WP, dan PDRB perkapita terhadap penerimaan PBB di DIY	Uji regresi dan kolerasi dengan program SPSS	Factor tingkat kepatuhan WP, jumlah surat penagihan WP, jumlah PDRB perkapita berpengaruh terhadap PBB di DIY
4	Muchlis (2002)	Factor yang mempengaruhi penerimaan PBB (studi komperatif Kab. Brebes dan Tegal)	Uji regresi linier berganda dengan SPSS	Factor luas lahan, luas bangunan, jumlah WP, tertib admin berpengaruh terhadap PBB

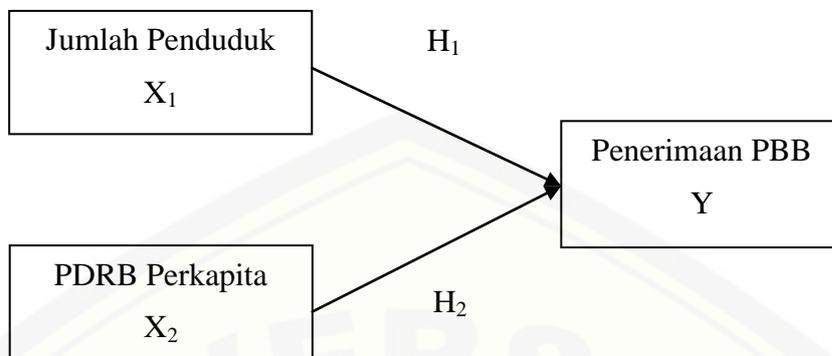
Sumber : data diolah dari berbagai sumber

2.3 Kerangka Konseptual

Pada umumnya harga tanah dari waktu ke waktu cenderung meningkat dan tidak mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan adanya permintaan akibat dari bertambahnya jumlah penduduk, tingkat PDRB perkapita dan tingkat inflasi di daerah tersebut yang mengakibatkan naiknya nilai jual tanah yang mengakibatkan meningkatnya penerimaan PBB (Kennet Davey, 1988;42). Dengan demikian maka dapat di gambarkan:

$$NJOP = f(\text{jumlah penduduk, PDRB, dan tingkat inflasi})$$

Skema kerangka konseptual



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Penelitian

2.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk pertanyaan (Sugiyono, 2005:51). Berdasarkan kerangka konseptual yang telah diuraikan yang telah dikemukakan, maka hipotesis yang dapat diajukan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut ;

- H₁ : Jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PBB di Kabupaten Jember;
- H₂ : Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita (PDRB) berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PBB di Kabupaten Jember.

BAB III. METODE PENELITIAN

3.1 Tempat Penelitian

Dalam hal ini penelitian dilakukan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember dan dinas dinas terkait. Objek penelitian ini adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pendapatan Daerah pada pemerintah daerah Kabupaten Jember, khususnya pada Dinas Pendapatan Daerah.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Data yang diperoleh dari penelitian adalah data sekunder. Menurut Sugiyono (2005:62), data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti, misalnya penelitian harus melalui orang lain atau mencari melalui dokumen. Data ini diperoleh dengan menggunakan studi literatur yang dilakukan terhadap banyak buku dan diperoleh berdasarkan catatan – catatan yang berhubungan dengan penelitian, selain itu peneliti mempergunakan data yang diperoleh dari internet. Pengertian tersebut dapat dijelaskan bahwa data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan yang tersedia di buku-buku, majalah, jurnal, dan sumber lain yang secara tidak langsung berhubungan dengan penelitian. Jenis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah:

a. Metode penelitian kuantitatif

Menurut Sugiyono, metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2012:7).

Penelitian kuantitatif merupakan studi yang diposisikan sebagai bebas nilai (*value free*). Dengan kata lain, penelitian kuantitatif sangat ketat menerapkan prinsip-prinsip objektivitas. Objektivitas itu diperoleh antara

lain melalui penggunaan instrumen yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Peneliti yang melakukan studi kuantitatif mereduksi sedemikian rupa hal-hal yang dapat membuat bias, misalnya akibat masuknya persepsi dan nilai-nilai pribadi. Jika dalam penelaahan muncul adanya bias itu maka penelitian kuantitatif akan jauh dari kaidah-kaidah teknik ilmiah yang sesungguhnya (Sudarwan Danim, 2002:35).

b. Metode penelitian kualitatif

Beberapa metodologi seperti Kirk dan Miller (1986), mendefinisikan metode kualitatif sebagai tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan terhadap manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya. Sedangkan menurut Bogdan dan Taylor (1975) dalam buku Moleong (2004:3) mengemukakan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Miles and Huberman (1994) dalam Sukidin (2002:2) metode kualitatif berusaha mengungkap berbagai keunikan yang terdapat dalam individu, kelompok, masyarakat, dan/atau organisasi dalam kehidupan sehari-hari secara menyeluruh, rinci, dalam, dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini dilakukan pengumpulan data untuk mendapatkan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pembahasan data yang yang digunakan dalam penelitian, antara lain:

a. Penelitian lapangan (*Field Research*)

Yaitu data yang dikumpulkan langsung dengan objek penelitian melalui kuesioner. Menurut Sugiono (2003:135) kuesioner merupakan “teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab”. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti

tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden. Dalam penelitian ini menggunakan terstruktur yang meliputi pertanyaan tertutup, yaitu menggunakan skala likert dengan lima tingkatan yaitu, STS = Sangat Tidak Setuju, TS = Tidak Setuju, CS = Cukup Setuju, S = Setuju, SS = Sangat Setuju. Dalam pertanyaan ini responden hanya memilih satu jawaban yang paling sesuai diantara alternatif jawaban yang ada.

b. Riset Perpustakaan Data

Yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku literatur-literatur dan beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan pihak terdahulu yang berhubungan dengan penelitian yang penulis lakukan saat ini sebagai dasar perbandingan dalam pembahasan yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas, dan bahan-bahan dari catatan kuliah yang penulis ikuti selama masa perkuliahan.

3.4 Operational Variabel

Pengertian operasional variabel menurut Sugiyono (2010:58) adalah : “Segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya.

a. Variabel Independen atau Variabel Bebas

Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel bebas (*independent variable*). Pengertian dari variabel bebas menurut Jonathan Sarwono dan Tutty Martadijera (2008:107) yaitu : “ Merupakan variabel yang dapat diukur, dimanipulasi atau dipilih oleh peneliti untuk menentukan hubungannya dengan suatu gejala yang diobservasi.”

Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel bebas (*independent variable*) merupakan suatu variabel yang bebas dimana keberadaanya tidak dipengaruhi oleh variabel yang lain, bahkan variabel ini merupakan suatu variabel yang dapat mempengaruhi variabel lain.

Menurut Sugiyono (2012:59) adalah “Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi suatu yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat)”. Pada penelitian yang dilakukan oleh penulis variabel independen adalah:

a) Jumlah penduduk (X_1) :

Jumlah penduduk adalah wajib pajak yang tercantum pada Buku Daftar Himpunan Ketetapan (DHKP) yang mempunyai ketetapan ~ Rp. 5.000.000.00) (Sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jendral Pajak No. Kep. 503IPJ/2000 tanggal 22 November 2000 tentang Tata cara penerbitan surat tagihan PBB dan tata cara pelaksanaan penagihan PBB dan Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan). Adapun pengukurannya adalah daftar wajib pajak yang tercantum pada Buku Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) yang mempunyai ketetapan z Rp 5.000.000,- dan tahun anggaran 2010-2012.

b) Pendapatan Domestik Regional Bruto per Kapita (X_2) :

PDRB perkapita adalah pendapatan kotor yang masyarakat di suatu wilayah tertentu dalam 1 tahun dibagi jumlah penduduk. Adapun pengukurannya adalah : Besarnya angka Realisasi pendapatan Domestik Regional Bruto perkapita di Kabupaten Jember tahun 2010-2012.

b. Variabel dependen atau Variabel Terikat

Pengertian variabel depeden menurut Sugiyono (2012:59) “Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel independen (bebas). ”Pada penelitian yang dilakukan oleh penulis variabel dependen (Y) adalah Penerimaan PBB (y) Penerimaan PBB adalah angka yang menunjukkan besarnya setoran pajak dari masyarkat kepada negara sesuai dengan ketetapannya. Adapun pengukurannya adalah angka yang menunjukkan realisasi setoran PBB secara bruto yang diterima di Kabupaten Jember tahun 2010-2012.

3.5 Populasi dan tempat

3.5.1. Pertumbuhan Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Jember berdasarkan hasil sensus penduduk Tahun 2012 tercatat sebanyak 2.329.929 jiwa, terdiri dari 1.143.766 jiwa penduduk laki-laki dan 1.186.163 jiwa penduduk perempuan, dengan sex ratio di Kabupaten Jember sebesar 96,43. Dari tahun ke tahun jumlah penduduk Kabupaten Jember relatif terus bertambah. Jika dibandingkan dengan Tahun 2008, penduduk Kabupaten Jember bertambah 14.227 jiwa atau sebesar 0,61 %. Jika dibandingkan dengan hasil sensus penduduk Tahun 2000, maka selama 10 (sepuluh) tahun terjadi pertambahan penduduk sebanyak 142.272 jiwa atau pertumbuhan rata-rata penduduk sebesar 0,63 % per tahun.

3.5.2 Persebaran dan Kepadatan

Distribusi penduduk Kabupaten Jember dapat dikatakan tersebar secara merata untuk masing-masing kecamatan. Kecamatan dengan jumlah penduduk paling banyak adalah Kecamatan Sumbersari dengan 125.981 jiwa (5,41 %), sedangkan Kecamatan Jelbuk merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit yaitu 31.967 jiwa (1,37 %). Kepadatan penduduk rata-rata di Kabupaten Jember pada Tahun 2010 adalah 707,47 jiwa/km². Kepadatan penduduk paling tinggi adalah di Kecamatan Kaliwates dengan tingkat kepadatan sebesar 4.479,55 jiwa/km², sedangkan Kecamatan Tempurejo memiliki tingkat kepadatan terendah dengan 134,71 jiwa/km².

Tabel 3.1 Jumlah dan Kepadatan Penduduk dan Proyeksinya untuk 5 tahun

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk			Jumlah KK			Tingkat Pertumbuhan		
		Tahun			Tahun			Tahun		
		n	n+1	n+4	N	n+1	n+4	N	n+1	n+4
1.	Kencong	65.127								
2.	Gumukmas	79.162								
3.	Puger	114.33	2							
4.	Wuluhan	114.65	2							
5.	Ambulu	104.96	2							
6.	Tempurejo	70.649								
7.	Silo	108.75	7							
8.	Mayang	48.408								
9.	Mumbulsari	62.323								
10.	Jenggawah	80.908								
11.	Ajung	74.377								
12.	Rambipuji	78.671								
13.	Balung	76.782								
14.	Umbulsari	69.311								
15.	Semboro	43.861								
16.	Jombang	54,30								
17.	Sumberbaru	166,37								
18.	Tanggul	199,99								
19.	Bangsalsari	175,28								
20.	Panti	160,71								
21.	Sukorambi	60,63								
22.	Arjasa	43,75								
23.	Pakusari	29,11								
24.	Kalisat	53,48								
25.	Ledokombo	146,92								
26.	Sumberjambe	138,24								
27.	Sukowono	44,04								
28.	Jelbuk	65,06								
29.	Kaliwates	24,94								
30.	Sumpersari	37,05								
31.	Patrang	36,99								

Sumber : Jember dalam angka

Tabel 3.2 Data perekonomian umum daerah 5 tahun terakhir

No	Deskripsi	n-4	n-3	n-2	n-1	N
----	-----------	-----	-----	-----	-----	---

(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
1	PDRB harga konstan (Struktur perekonomian) (Rp)	Rp9,783,828,130,000.00	Rp10,326,735,610,000.00	Rp24,518,550,060,000.00		
2	Pendapatan perkapita kabupaten/kota (Rp)	Rp 8,277,230.00	Rp 9,198,010.00	Rp 9,681,440.00		
3	Upah minimum regional kabupaten/kota (Rp)	Rp 645,000.00	Rp 770,000.00	Rp 875,000.00	Rp920,000.00	Rp920,000.00
4	Inflasi (%)	11,10%	5,72%	7,87%	0.00%	0.00%
5	Pertumbuhan ekonomi (%)	6,04%	5,5%	6,04%	0.00%	0.00%

Sumber : PDRB kabupaten Jember

Tabel 3.3 : Jumlah rumah per kecamatan

Nama Kecamatan	Jumlah Rumah
Kencong	19,155
Gumukmas	23,283
Puger	33,627
Wuluh	33,721
Ambulu	30,871
Tempurejo	20,779
Silo	30,517
Mayang	14,238
Mumbulsari	18,330
Jenggawah	23,796
Ajung	21,876
Rambipuji	23,139
Balung	22,583
Umbulsari	20,386
Semboro	12,900
Jombang	14,696
Sumberbaru	29,138
Tanggul	24,289

Bangsalsari	33,504
Panti	17,625
Sukorambi	11,145
Arjasa	11,191
Pakusari	12,235
Kalisat	21,991
Ledokombo	18,324
Sumberjambe	17,713
Sukowono	17,309
Jelbuk	9,402
Kaliwates	32,859
Sumbersari	37,053
Patrang	27,785

sumber : Jember dalam angka 2012

3.6 Metode Penelitian

3.6.1 Metode Penelitian Yang Digunakan

Metodologi Penelitian merupakan suatu teknik atau cara untuk mencari, mengungkapkan, memperoleh atau mencatat data, baik berupa data primer maupun data sekunder yang digunakan untuk keperluan menyusun suatu karya ilmiah dan kemudian menganalisa faktor-faktor yang berhubungan dengan pokok permasalahan sehingga akan diperoleh suatu kebenaran data.

a. Metode Deskriptif Analisis Metode

Deskriptif analisis menurut Sugiyono (2002:11) menyatakan bahwa: “Metode deskriptif analisis adalah metode yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel lain.”

Sedangkan menurut Jonathan Sarwono (2006:258) Pendekatan Kuantitatif adalah: “Pendekatan Kuantitatif mementingkan adanya variabel-variabel sebagai objek penelitian dan variabel-variabel tersebut harus didefinisikan dalam bentuk operasionalisasi variabel masing-masing. Reliabilitas dan

validitas merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam menggunakan pendekatan ini karena kedua elemen tersebut akan menentukan kualitas hasil penelitian.”

b. Metode Historis

Menurut Djudju Sudjana, dalam diktat “dasar-dasar metode penelitian sosial dan pendidikan” mengatakan bahwa metode penelitian histories adalah untuk merekonstruksi masa lampau secara sistematis dan obyektif, melalui kegiatan pengumpulan, evaluasi, verifikasi dan sintesis dari bukti-bukti untuk menegakkan fakta dan memperoleh kesimpulan yang kuat.

3.6.2. Analisis Data

3.6.2.1 Uji Asumsi Klasik

Setelah memperoleh model regresi linier berganda, maka langkah selanjutnya yang dilakukan apakah model yang dikembangkan bersifat BLUE (*Best Linier Unbised Estimator*). Metode ini mempunyai kriteria bahwa pengamatan harus mewakili variasi minimum, konstanta, dan efisien. Asumsi BLUE yang harus dipenuhi antara lain : data berdistribusi normal, tidak ada multikolinearitas, tidak terjadi heteroskedastisitas dan tidak terjadi autokorelasi.

a. Uji Normalitas

1) Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel independen, variabel dependen atau keduanya mempunyai distribusi normal ataukah mutlak regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati normal. Mendeteksi normalitas dengan melihat penyebaran data titik pada sumbu diagonal dari grafik (Latan, 2013:56). Dasar pengambilan keputusan antara lain :

- a) Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas;
- b) Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

2) Uji Normalitas

Uji normalitas data dilakukan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas yang dilakukan terhadap sampel dilakukan dengan menggunakan *kolmogorov-smirnov test* dengan menetapkan derajat keyakinan (α) sebesar 5%. Uji ini dilakukan pada setiap variabel dengan ketentuan bahwa jika secara individual masing-masing variabel memenuhi asumsi normalitas, maka secara simultan variabel-variabel tersebut juga bisa dinyatakan memenuhi asumsi normalitas (Latan, 2013:56). Kriteria pengujian dengan melihat besaran *kolmogorov-smirnov test* adalah;

- a) Jika signifikansi $> 0,05$ maka data tersebut berdistribusi normal
- b) Jika signifikansi $< 0,05$ maka data tersebut tidak berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas adalah pengujian dari asumsi untuk membuktikan bahwa variabel-variabel bebas dalam suatu model tidak saling berkorelasi satu dengan lainnya. Adanya multikolinearitas dapat menyebabkan model regresi yang diperoleh tidak valid untuk menaksir variabel independen. Gejala multikolinearitas juga dapat dideteksi dengan melihat besarnya VIF (*Variance Inflation Factor*). Latan (2013:61), menyatakan bahwa indikasi multikolinearitas pada umumnya terjadi jika VIF lebih dari 10, maka variabel tersebut mempunyai persoalan multikolinieritas dengan variabel bebas lainnya.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Cara memprediksi ada tidaknya heteroskedastisitas pada suatu model dapat dilihat dari pola gambar scatterplot model tersebut (Latan, 2013:66). Dasar pengambilan keputusan antara lain :

- 1) Jika ada pola tertentu. seperti titik-titik (point-point) yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka telah terjadi heteroskedastisitas;
- 2) Jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

d. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi adalah keadaan dimana terjadinya autokorelasi antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lainnya atau melihat kebebasan data pada model regresi. Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi yang terjadi diantara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lainnya pada model regresi (Janie, 2012:32). Metode pengujiannya menggunakan Durbin Watson Tabel (Uji DW) dengan taraf signifikansi 5%. Dasar pengambilan keputusan antara lain :

- 1) Penentuan dL dan dU ($4 - dU$);
- 2) $dU < DW < (4 - dU)$;
- 3) Jika nilai dU lebih kecil dari nilai DW hitung lebih kecil dari $(4 - dU)$, maka dapat diasumsikan model tidak terjadi antokorelasi positif atau negatif

3.6.2.2 Analisis Deskriptif Statistik

Analisis deskriptif statistik adalah menggambarkan tentang ringkasan data-data penelitian seperti mean, standar deviasi, varian, modus, dll. Analisis deskriptif ini dapat digunakan untuk memberikan penjelasan dalam penelitian lanjutan untuk memberikan hasil yang lebih baik terhadap analisis regresi. Analisis deskriptif bersifat penjelasan statistik dengan memberikan gambaran data tentang jumlah data, minimum, maximum, mean, dan standar deviasi (Prayitno, 2010:12).

3.6.2.3 Analisis Regresi

Analisis Regresi Linear Berganda merupakan salah satu analisis yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh suatu variabel terhadap variabel lain. Dalam analisis regresi variabel yang mempengaruhi disebut *independent variable* (variabel bebas) dan variabel yang dipengaruhi disebut *dependent variable* (variabel terikat). Jika dalam persamaan regresi hanya terdapat salah satu variabel bebas dan satu variabel terikat, maka disebut sebagai regresi sederhana, sedangkan jika variabelnya bebasnya lebih dari satu, maka disebut sebagai persamaan regresi berganda (Prayitno, 2010:61).

Untuk mengetahui pengaruh jumlah penduduk dan PDRB terhadap penerimaan PBB di Kabupaten Jember, digunakan analisis regresi linier berganda sebagai berikut (Prayitno, 2010:61) ;

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan :

Karakteristik pada masing-masing variabel

a = konstanta atau besarnya koefisien masing-masing variabel sama dengan nol

b_1 = besarnya pengaruh jumlah penduduk

b_2 = besarnya pengaruh PDRB

X_1 = variabel jumlah penduduk

X_2 = variabel PDRB

Y = penerimaan PBB

e = faktor gangguan

3.6.2.4 Uji Hipotesis

Uji hipotesis digunakan untuk mengetahui signifikansi dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat yang terdapat dalam model. Uji hipotesis yang dilakukan adalah :

a. Uji t

Analisis ini digunakan untuk membuktikan signifikan tidaknya antara jumlah penduduk dan PDRB terhadap penerimaan PBB di Kabupaten Jember. Rumusnya adalah (Prayitno, 2010:68) ;

$$t = \frac{b_i}{Se(b_i)}$$

Keterangan :

t = test signifikan dengan angka korelasi

b_i = koefisien regresi

Se (b_i) = *standard error* dari koefisien korelasi

Formulasi hipotesis uji t ;

1) H₀ : b_i = 0, i = 1, 2

H₀ diterima dan H_a ditolak, tidak ada pengaruh secara parsial (individu) antara variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y)

2) H_a : b_i ≠ 0, i = 1, 2

H₀ ditolak dan H_a diterima, ada pengaruh secara parsial (individu) antara variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y)

3) *Level of significane* 5% (Uji 2 sisi, 5% : 2 = 2,5%)

b. Uji F

Uji F digunakan untuk melihat signifikansi pengaruh dari variabel bebas secara simultan (serentak) terhadap variabel terikat (Prayitno, 2010:67). Dalam penelitian ini uji F digunakan untuk melihat signifikansi pengaruh dari variabel X₁, dan X₂, secara simultan terhadap variabel Y.

Rumus yang akan digunakan adalah :

$$F = \frac{R^2/(k - 1)}{1 - R^2/(n - k)}$$

Keterangan :

F = pengujian secara simultan

R² = koefisien determinasi

k = banyaknya variabel

n = banyaknya sampel

Formulasi hipotesis uji F ;

1) H₀ : b₁, b₂, b₃ ≠ 0

H_0 ditolak dan H_a diterima, ada pengaruh secara simultan antara variabel bebas (X_1 , dan X_2) terhadap variabel terikat (Y)

2) $H_a : b_1, b_2, b_3 = 0$

H_0 diterima dan H_a ditolak, tidak ada pengaruh simultan antara variabel bebas (X_1 , dan X_2) terhadap variabel terikat (Y)

3) *Level of significane* 5%.

c. Uji R^2 (Koefisien Determinasi)

Koefisien determinasi adalah data untuk mengetahui seberapa besar prosentase pengaruh langsung variabel bebas yang semakin dekat hubungannya dengan variabel terikat atau dapat dikatakan bahwa penggunaan model tersebut bisa dibenarkan. Dari koefisiensi determinasi (R^2) dapat diperoleh suatu nilai untuk mengukur besarnya sumbangan dari beberapa variabel X terhadap variasi naik turunnya variabel Y (Prayitno, 2010:66).

$$R^2 = \sum Y \frac{b^1 \sum X_1 Y + b^2 \sum X_2 Y + b^3 \sum X_3 Y + b^4 \sum X_4 Y}{\sum Y^2}$$

Keterangan :

R^2 = Koefisien determinasi berganda

Y = Variabel terikat (*dependent*)

X = Variabel bebas (*Independent*)

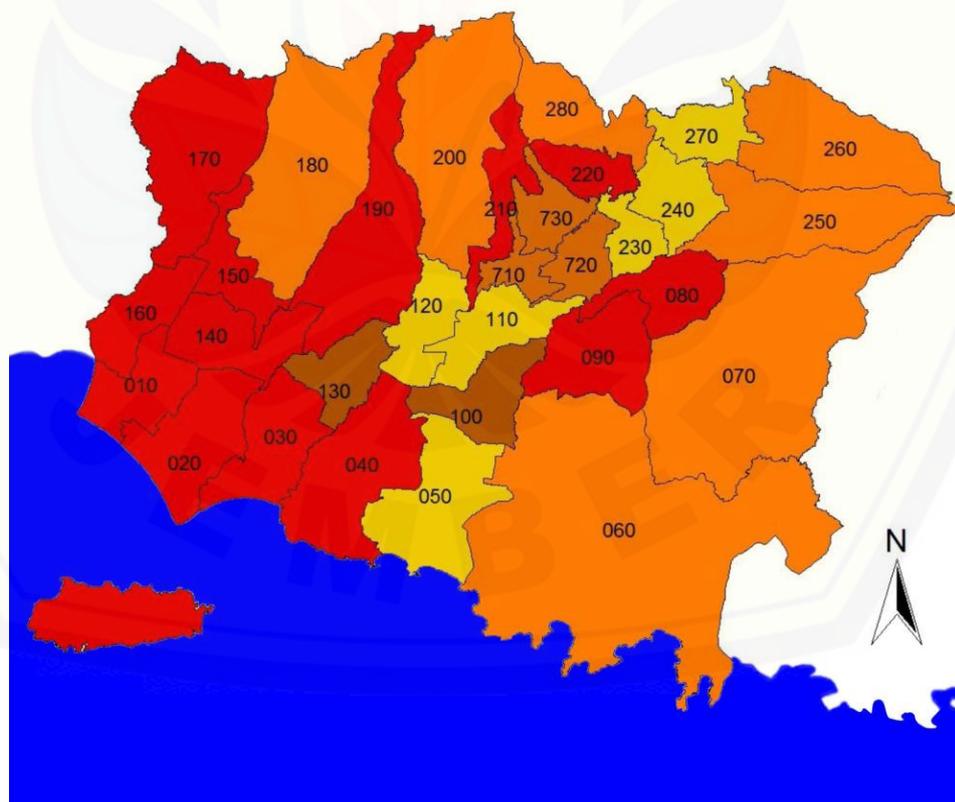
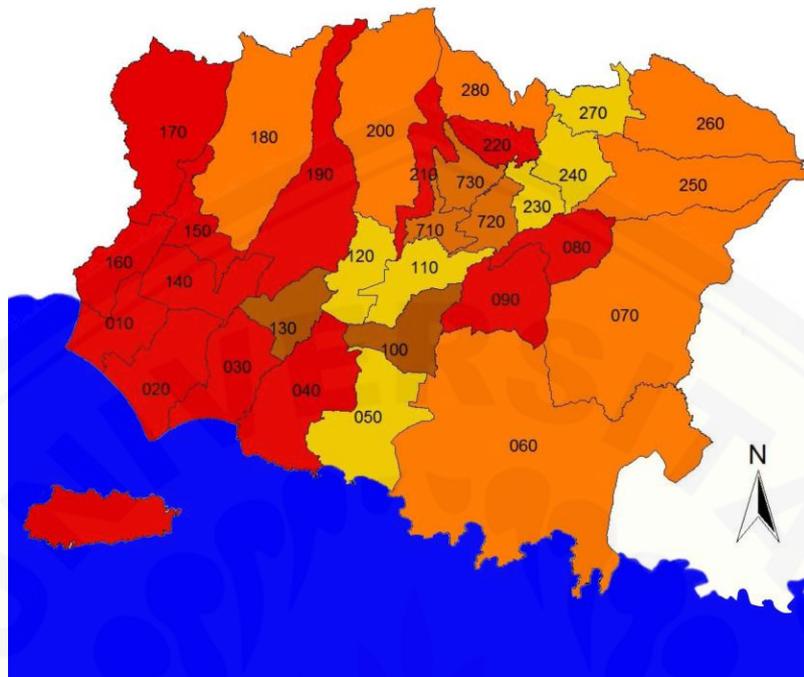
b = Koefisien regresi linier

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum

4.1.1 Letak Geografis Kabupaten Jember

Secara astronomi Kabupaten Jember terletak pada posisi 27°29”s/d 14°35” Bujur Timur dan 59°6” s/d 33°56” Lintang Selatan. Jember memiliki luas 3.293,34 Km² dengan ketinggian antara 0 – 3.330 mdpl. Iklim Kabupaten Jember adalah tropis dengan kisaran suhu antara 23°C – 32°C. Bagian selatan wilayah Kabupaten Jember adalah dataran rendah dengan titik terluarnya adalah Pulau Barong. Pada kawasan ini terdapat Taman Nasional Meru Betiri yang berbatasan dengan wilayah administratif kabupaten Banyuwangi. Bagian barat laut (berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo adalah pegunungan, bagian dari Pegunungan Iyang, dengan puncaknya Gunung Argopuro (3.088 m). Bagian timur merupakan bagian dari rangkaian Dataran Tinggi Ijen. Jember memiliki beberapa sungai antara lain Sungai Bedadung yang bersumber dari Pegunungan Iyang di bagian Tengah, Sungai Mayang yang persumber dari Pegunungan Raung di bagian timur, dan Sungai Bondoyudo yang bersumber dari Pegunungan Semeru di bagian barat. Secara administrative Jember terbagi menjadi 31 kecamatan dan 248 desa/ kelurahan dan memiliki sekitar 76 pulau-pulau kecil.



Gambar 1 Peta Kabupaten Jember (www.jemberkab.go.id)

Luas wilayah Kabupaten Jember 3.293,34 Km², dengan karakter topografi berbukit hingga pegunungan di sisi utara dan timur serta dataran subur yang luas ke arah selatan. Secara administratif wilayah Kabupaten Jember terbagi menjadi 31 kecamatan terdiri atas 28 kecamatan dengan 225 desa dan 3 kecamatan dengan 22 kelurahan. Kecamatan terluas adalah Tempurejo dengan luas 524,46 Km² atau 15,9% dari total luas wilayah Kabupaten Jember. Kecamatan yang terkecil adalah Kaliwates, seluas 24,94 Km² atau 0,76%.

Kawasan lindung di Kabupaten Jember terdiri atas :

- 1) Kawasan yang memberikan perlindungan di bawahnya yang berada di bagian timur,
- 2) Kawasan perlindungan setempat yang berada di sempadan pantai selatan Jember (100 m), sempadan sungai/kali di seluruh Jember, kawasan sekitar waduk, dan kawasan sekitar mata air,
- 3) Kawasan suaka alam berada di Wisata Pantai Watu Ulo, Gunung Watangan, Taman Nasional Meru Betiri dan Pegunungan Hyang,
- 4) Kawasan cagar budaya di Kecamatan Arjasa,
- 5) Kawasan rawan bencana alam karena erosi tinggi berada di Kecamatan Arjasa, Patrang, Sumberjambe, Mumbulsari, Kencong dan Wuluhan, dan kawasan rawan bencana alam karena hutan rusak berada di Kecamatan Silo dan Mumbulsari.

Kawasan budidaya terdiri dari :

- 1) Pertanian Tanaman Pangan berada di seluruh kawasan kecuali pusat kota,
- 2) Perkebunan berada di lereng Gunung Argopuro dengan komoditi teh, kopi, kakao, karet; lereng Gunung Raung dengan komoditi kopi dan tembakau; kawasan tengah hingga selatan dengan komoditi tembakau, tebu dan kelapa,
- 3) Perikanan laut terdapat di Kecamatan Gumukmas, Puger, Ambulu, Wuluhan dan Kencong; perikanan darat terdapat di Kecamatan Rambipuji, Kalisat dan Bangsalsari,
- 4) Pertambangan/Galian C berada di Kecamatan Puger, Pakusari, Sumpalsari, Kalisat, Wuluhan, Arjasa, Ledokombo dan Rambipuji,

- 5) Hutan Produksi berada di kawasan perbatasan dengan Bondowoso dan Banyuwangi,
- 6) Industri kecil tersebar di setiap kecamatan, industri manufaktur berada di Kecamatan Rambipuji, Panti, Balung, Jenggawah, Sumpalsari dan Arjasa,
- 7) Permukiman berada di Kawasan Pusat Kota dan setiap ibukota kecamatan.

Kabupaten Jember berbentuk dataran ngarai yang subur pada bagian Tengah dan Selatan, dikelilingi pegunungan yang memanjang sepanjang batas Utara dan Timur serta Samudra Indonesia sepanjang batas Selatan dengan Pulau Nusabarong yang merupakan satu-satunya pulau yang ada di wilayah Kabupaten Jember. Letaknya yang strategis karena berada dipersimpangan antara Surabaya dan Bali, sehingga perkembangannya cukup pesat dan menjadi barometer pertumbuhan ekonomi di kawasan Timur Jawa Timur. Sebagai Daerah Otonom, Kabupaten Jember memiliki batas-batas teritorial, luas wilayah, kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial politik dan sosial budaya serta sumber daya manusia. Kondisi obyektif yang demikian dapat mengungkapkan berbagai karakteristik sumberdaya alam, komoditas yang dihasilkan, mata pencaharian penduduk, keadaan serta ekonomi dan sosial budayanya yang mencerminkan kekuatan sebagai suatu kompetensi daerah, sekaligus beragam permasalahan yang dihadapinya.

4.1.2 Kondisi Demografis Kabupaten Jember

Pada Tahun 2011 jumlah penduduk Kabupaten Jember mengalami peningkatan yaitu sebesar 2.451.081 jiwa. Sedangkan Berdasarkan hasil Sensus Penduduk Tahun 2010, jumlah penduduk Kabupaten Jember adalah sebesar 2.332.726 jiwa, terjadi peningkatan sebesar 7,01% dibandingkan hasil registrasi penduduk akhir tahun 2009 sebesar 2.179.829 jiwa. Peningkatan jumlah penduduk tersebut mempengaruhi tingkat kepadatan penduduk yang juga mengalami peningkatan dari 661,89 jiwa/km² pada tahun 2009 menjadi 708,32 jiwa/km² pada tahun 2010. Kepadatan penduduk yang cukup tinggi terjadi pada wilayah ibu kota kabupaten seperti Kecamatan Kaliwates, Sumpalsari, Patrang dengan tingkat

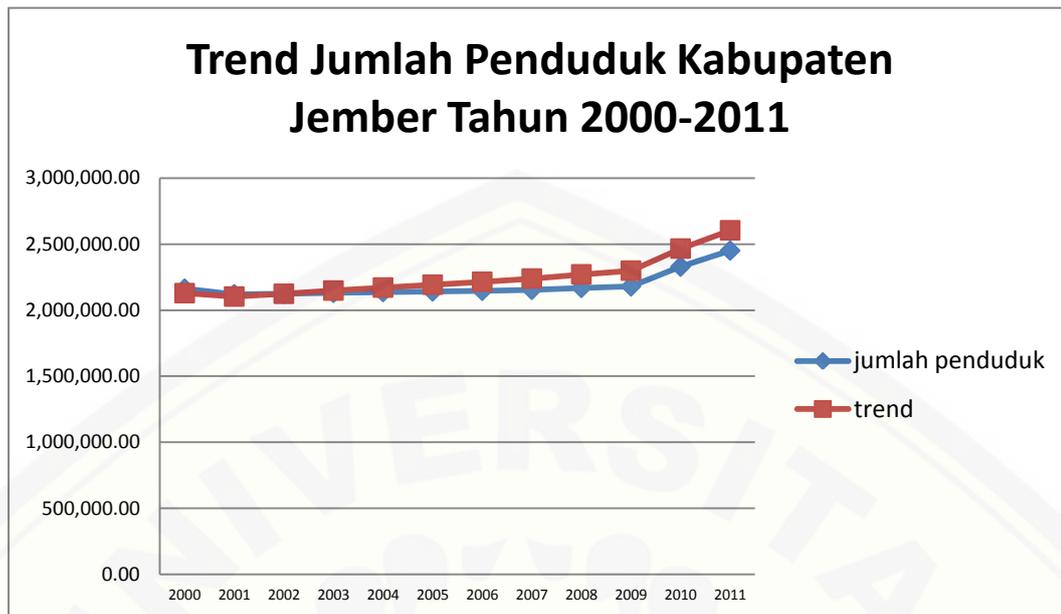
kepadatan masing-masing 4.485,20 jiwa/km², 3.408,34 jiwa/km² dan 2.553,96 jiwa/km². Padahal ketiga wilayah tersebut memiliki presentase luas wilayah yang relatif kecil terhadap luas Kabupaten Jember, dengan proporsi luas masing-masing sebesar 0,76%, 1,12% dan 1,12%.

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Jember Tahun 2000-2011

Tahun	Jumlah Penduduk
2000	2.162.688
2001	2.120.074
2002	2.123.968
2003	2.131.289
2004	2.136.999
2005	2.141.467
2006	2.146.571
2007	2,153.883
2008	2.168.732
2009	2.179.829
2010	2.329.929
2011	2.451.081
Rata-Rata	2.187.209

Sumber : BPS Kabupaten Jember, diolah

Dari tabel 4.1 kita dapat melihat jumlah penduduk Kabupaten Jember yang setiap tahunnya mengalami peningkatan. Namun pada tahun 2001 jumlah penduduk turun sebesar 42.614 jiwa. Berdasarkan hasil analisis trend, jumlah penduduk dari Kabupaten Jember memiliki trend yang positif karena garis trend bergerak dari kiri bawah ke kanan atas yang menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kabupaten Jember terus meningkat setiap tahunnya. Hal ini dapat diketahui dari gambar 4.2 di bawah ini.



Sumber : Lampiran A3

Gambar 2 Trend Jumlah Penduduk Kabupaten Jember Tahun 2000-2011

Tabel 4.2 Banyaknya Kelurahan/ Desa, Dusun/ Lingkungan, RW, RT Menurut Kecamatan, 2012

No	Kecamatan	Desa/kelurahan	Dusun/lingkungan	RW	RT
1	Kencong	5	24	123	526
2	Gumuk Mas	8	24	159	452
3	Puger	12	37	288	658
4	Wuluan	7	25	126	719
5	Ambulu	7	27	200	637
6	Tempurejo	8	29	109	441
7	Silo	9	41	213	622
8	Manyang	7	24	109	347
9	Mumbulsari	7	26	86	463
10	Jenggawah	8	36	97	536
11	Ajung	7	33	113	491
12	Rambipuji	8	42	159	517
13	Balung	8	27	110	368
14	Umbulsari	10	26	153	450
15	Semboro	6	14	98	291
16	Jombang	6	17	134	402
17	Sumberbaru	10	36	166	599
18	Tanggul	8	24	140	507
19	Bangsalsari	11	40	253	569
20	Panti	7	26	91	423
21	Sukorambi	5	16	66	249

22	Arjasa	6	26	64	253
23	Pakusari	7	26	96	293
24	Kalisat	12	51	151	473
25	Ledokombo	10	39	147	422
26	Sumberjambe	9	58	103	426
27	Sukowono	12	27	143	374
28	Jelbuk	6	42	78	236
29	Kaliwates	7	32	152	490
30	Sumbersari	7	33	152	505
31	Patrang	8	38	119	404
Tahun 2012		248	966	4189	14.143
Tahun 2011		248	966	4127	14.166

Sumber : Bagian Pemerintahan Desa Kabupaten Jember 2012

Berikut adalah data jumlah penduduk selama 5 tahun, dari tahun 2009 sampai dengan 2013. Data yang diperoleh didapatkan dari Badan Pusat Statistik Jember (BPS), sebagai berikut ;

Tabel 4.3 Jumlah Penduduk di Kabupaten Jember

No	Kecamatan	2009	2010	2011	2012	2013
1	Kencong	5892458	6012712	6198672	632518	65208
2	Gumukmas	7181501	7328062	7554703	770888	79473
3	Puger	10409756	10622200	10950722	1117421	115198
4	Wuluhan	10396593	10608769	10936875	1116008	115052
5	Ambulu	9528104	9722556	10023253	1022781	105441
6	Tempurejo	6408346	6539129	6741370	687895	70917
7	Silo	9460783	9653860	9952433	1015554	104696
8	Mayang	4404554	4494443	4633446	472801	48742
9	Mumbulsari	5681217	5797160	5976454	609842	62870
10	Jenggawah	7384429	7535131	7768176	792671	81719
11	Ajung	6775104	6913371	7127187	727264	74976
12	Rambipuji	7167736	7314016	7540223	769410	79321
13	Balung	6978845	7121270	7341515	749134	77230
14	Umbulsari	27378255	27936995	28801025	2938880	302977
15	Semboro	3940866	4021292	4145662	423027	43611
16	Jombang	4521093	4613361	4756042	485310	50032
17	Sumberbaru	9007638	9191467	9475739	966912	99682
18	Tanggul	7505787	7658967	7895842	805698	83062
19	Bangsalsari	10352917	10564201	10890929	1111319	114569
20	Panti	5399823	5510024	5680437	579636	59756

21	Sukorambi	3453985	3524474	3633478	370763	38223
22	Arjasa	3423502	3493369	3601411	367491	37886
23	Pakusari	3791133	3868503	3988147	406954	41954
24	Kalisat	6831461	6970878	7186473	733314	75599
25	Ledokombo	5682964	5798943	5978292	610030	62890
26	Sumberjambe	5473320	5585020	5757753	587526	60570
27	Sukowono	5331568	5440376	5608635	572310	59001
28	Jelbuk	2931108	2990927	3083430	314636	32437
29	Kaliwates	10210383	10418758	10740988	1096019	112992
30	Sumbersari	11513191	11748155	12111500	1235867	127409
31	Patrang	8601662	8777206	9048666	923333	95189

Sumber : BPS Jember 2014

Berdasarkan data dari BPS Jember, dapat diketahui bahwa selama 5 tahun ada 5 kecamatan dengan jumlah populasi terendah, yaitu Semboro, Sukorambi, Arjasa, Pakusari dan Jelbuk. Sedangkan kecamatan yang memiliki jumlah populasi terpadat, yaitu Puger, Wuluhan, Umbulsari, Bangsalsari, dan Summersari.

Jumlah populasi penduduk yang rendah di 5 kecamatan dapat disebabkan oleh adanya struktur demografis daerah, daerah yang ada pada 5 kecamatan tersebut, meliputi persawahan dan perkebunan yang luas, sehingga konsentrasi penduduk hanya terjadi disekitar jalur lintas kendaraan, atau lokasi-lokasi yang telah menjadi perumahan atau perkampungan. Sedangkan populasi penduduk yang padat atau tinggi di 5 kecamatan dapat disebabkan oleh adanya struktur demografi didalam suatu wilayah, daerah yang penduduk umumnya adalah daerah yang jauh dari pusat kota sehingga membentuk konsentrasi ekonomi pada desa yang jauh dari perkotaan, perkotaan sebagai pusat kota, dan daerah yang dekat atau lokasi sebagai perkantoran dan tempat pendidikan atau perkualiahan.

4.1.3 Keadaan Ekonomi Kabupaten Jember

Selama bertahun-tahun perekonomian Kabupaten Jember terus mengalami peningkatan. Peningkatan perekonomian itu tentu saja ditopang dari sembilan sektor ekonomi yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian Jember. Dapat kita lihat saja angka PDRB Kabupaten Jember pada tahun 2011 ini mengalami peningkatan sebesar 28.273.554,94 juta rupiah dengan kontribusi ekonominya sebesar 37,46 persen berdasarkan perhitungan harga berlaku. Kontribusi terbesar

masih dipegang oleh sektor pertanian yaitu mencapai besaran 10.663.456,54 juta rupiah pada tahun 2011. Sektor pertanian yang sejak bertahun-tahun lamanya menunjukkan kinerja yang impresif seiring dengan membaiknya perekonomian di Kabupaten Jember, peran sektor pertanian cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun secara perlahan. Perubahan ini bukan berarti sektor pertanian mengalami penurunan, tetapi semata-mata karena sektor lain tumbuh lebih cepat daripada sektor pertanian.

Tabel 4.4 Rata-Rata Pangsa Masing-Masing Sektor di Kabupaten Jember Atas Dasar Harga Berlaku, Tahun 2000-2011 (%)

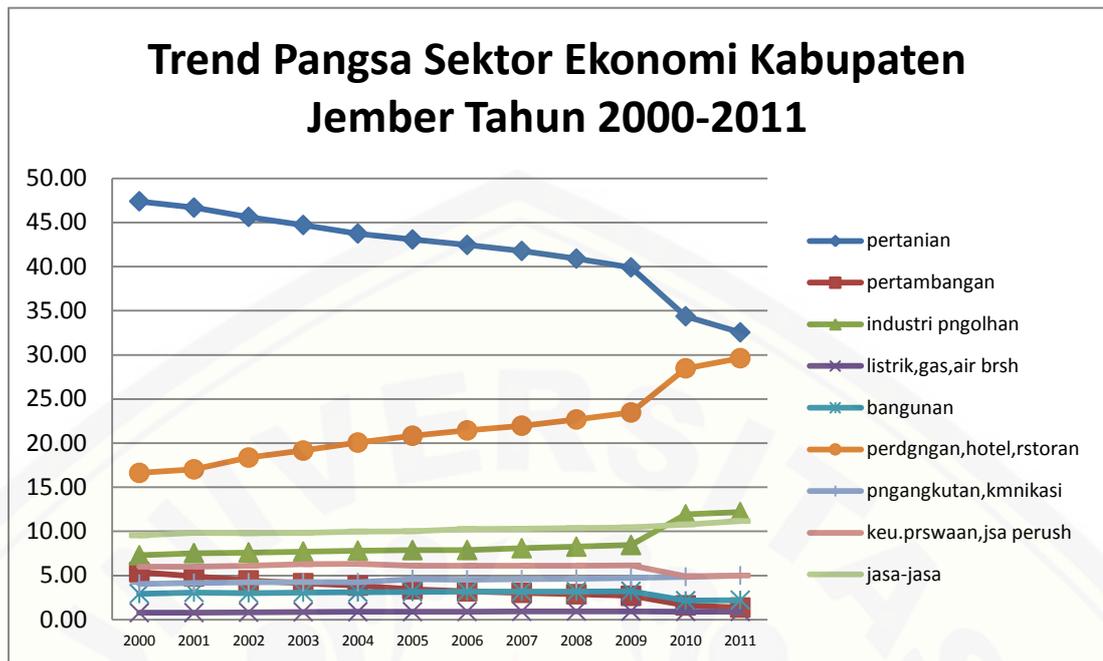
Sektor	Pangsa Rata-Rata	Trend
Sektor Primer :		
1. Pertanian	43,85	Negatif
2. Pertambangan	3,96	Negatif
Sektor Sekunder :		
3. Industri Pengolahan	8,02	Positif
4. Listrik, Gas dan Air Bersih	0,86	Positif
5. Bangunan	3,01	Positif
Sektor Tersier :		
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	19,91	Positif
7. Pengangkutan dan Komunikasi	4,35	Positif
8. Keu. Persewaan dan Jasa Perush.	6,05	Negatif
9. Jasa-Jasa	9,98	Positif

Sumber : Lampiran A4

Sektor perdagangan, hotel, dan restoran merupakan sektor yang memiliki pangsa terbesar kedua dalam struktur perekonomian setelah sektor pertanian. Terutama pada sub sektor perdagangan, masih memberikan sumbangan terhadap pembentukan PDRB Kabupaten. Hal ini ditandai dengan berkembangnya minimarket/supermarket baru seperti *indomart* dan *alfamart* di berbagai pelosok kecamatan dan pusat perbelanjaan seperti *golden market*, *carefour*, *matahari departement store* dan *roxy* yang masih menunjukkan eksistensinya. Tidak hanya di wilayah kecamatan kota, pendirian minimarket/supermarket tampak menjamur dengan radius lokasi tidak lebih dari satu kilometer.

Nampak bahwa usaha bisnis dan perdagangan saat ini merupakan usaha yang paling menguntungkan bagi pengusaha, karena dengan resiko minimal, sektor ini mampu memberi keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan sektor yang lain. Selain itu, untuk berusaha di bidang bisnis dan perdagangan tidak memerlukan keahlian tertentu seperti halnya pada sektor yang lainnya. Pada tahun 2010 sektor perdagangan, hotel dan restoran berperan sebesar 24,52, sementara di tahun 2011 mengalami peningkatan sebesar 25,17 yang artinya kontribusinya naik 0,65 persen.

Kontribusi pangsa terbesar ketiga merupakan sektor industri pengolahan yaitu dengan pangsa sebesar 10,81 pada tahun 2011. Setiap tahun sektor industri pengolahan mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini dapat ditunjukkan dengan banyaknya masyarakat Jember yang banyak bergerak di industri pengolahan berupa sub sektor makanan, minuman dan tembakau. Kontribusi pangsa keempat ditunjukkan oleh sektor jasa-jasa yaitu sebesar 10,62 pada tahun 2011 yang naik dari 10,30 pada tahun 2010. Yang kelima adalah sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan yang memberikan kontribusi sebesar 5,30 di tahun 2011. Kontribusi keenam yaitu sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 4,65. Selanjutnya yang ketujuh kontribusi dari sektor pertambangan dan galian dengan angka 2,78. Sektor bangunan hanya menyumbang 2,36 bagi perekonomian Kabupaten Jember. Kontribusi terkecil ditunjukkan oleh sektor listrik, gas dan air bersih yang hanya memberikan pangsa sebesar 0,85 (Lampiran)



Sumber : Lampiran

Gambar 3. Trend Pangsa Masing-Masing Sektor di Kabupaten Jember Tahun 2000-2011

1) Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Jember

Dalam menghitung pertumbuhan ekonomi suatu wilayah biasanya menggunakan PDRB harga konstan 2000 karena dalam perhitungannya masih menggunakan harga yang sama yaitu harga pada tahun 2000 sehingga pertumbuhan ekonomi ini benar-benar diakibatkan dari perubahan jumlah nilai produksi sektoral yang sudah bebas dari pengaruh harga. Berdasarkan harga konstan tahun 2000, nilai PDRB Kabupaten Jember terus mengalami peningkatan di tiap tahunnya. Pada tahun 2011 ini saja telah mencapai 12.358.978,61 juta rupiah dengan angka pertumbuhan sebesar 7,00 persen dibandingkan dengan tahun 2010 yang tercatat sebesar 11.550.549,44 juta rupiah dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,05 persen.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jember tahun 2011 yang tercatat sebesar 7,00 persen didorong oleh percepatan pertumbuhan di semua sektor. Sektor-sektor yang mengalami percepatan pertumbuhan tertinggi dari PDRB atas dasar harga konstan 2000 adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar

10,66 persen, sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 9,93 persen, sektor jasa-jasa sebesar 8,87 persen dan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan sebesar 8,76 persen. Sementara itu apabila dilihat dari percepatan pertumbuhan yang terendah dialami oleh sektor pertanian sebesar 3,63 persen dan sektor penggalian sebesar 4,29 persen (Lampiran)

Tabel 4.5 Rata-Rata Pertumbuhan Masing-Masing Sektor Terhadap Pertumbuhan PDRB Kabupaten Jember Harga Konstan 2000 Tahun 2001-2011 (%)

Sektor	Pertumbuhan Sektoral Rata-Rata	Trend
Sektor Primer :		
1. Pertanian	4,07	Positif
2. Pertambangan	3,51	Positif
Sektor Sekunder :		
3. Industri Pengolahan	4,97	Positif
4. Listrik, Gas dan Air Bersih	6,47	Positif
5. Bangunan	6,43	Positif
Sektor Tersier :		
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	6,48	Positif
7. Pengangkutan dan Komunikasi	5,53	Positif
8. Keu. Persewaan dan Jasa Perush.	6,06	Positif
9. Jasa-Jasa	5,67	Positif

Sumber : Lampiran A5

Dari tabel diatas dapat dilihat mulai tahun 2000 hingga tahun 2011, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Jember secara umum menunjukkan “*ascending economic growth trend*” atau trend pertumbuhan ekonomi yang terus menaik. Pada tahun 2009 pertumbuhan ekonomi hanya mampu tumbuh sebesar 5,55 persen karena disebabkan oleh pengaruh krisis global dunia seperti menurunnya nilai ekspor dan permintaan luar negeri akan produk perkebunan dan industri yang memang mempunyai kualitas ekspor. Keadaan semakin membaik permintaan luar negeri akan produk ekspor mulai meningkat begitu juga dengan optimisnya pasar dan meningkatnya daya beli masyarakat sehingga pertumbuhan ekonomi meningkat menjadi 7,00 persen pada tahun 2011.

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi pada tahun 2011 ini karena perekonomian Kabupaten Jember saat ini sepenuhnya bertumpu pada sektor perdagangan, hotel dan restoran, terutama dengan subsektor perdagangannya yaitu sebesar 10,66 persen. Selain itu sektor pengangkutan dan komunikasi juga memberikan kontribusi yang cukup banyak bagi perekonomian Kabupaten Jember sebanyak 9,33 persen. Kontribusi terbesar ketiga adalah sektor jasa-jasa.



Sumber : BPS Kabupaten Jember, diolah

Gambar 4. Pertumbuhan Sektoral Kabupaten Jember Tahun 2011 Atas Dasar Harga Konstan

Pertumbuhan ekonomi di Jember pada tahun 2012 cukup tinggi yakni mencapai 7 persen, bahkan sudah melampaui pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 6 persen. Pertumbuhan ekonomi di Jember terus meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya seiring dengan meningkatnya produktivitas dari sektor perdagangan, pembangunan hotel dan restoran.

Beberapa faktor penyumbang angka produktivitas pertumbuhan ekonomi di Jember antara lain perdagangan, hotel dan restoran, kemudian industri pengolahan, pengangkutan dan komunikasi, listrik gas dan air bersih, jasa-jasa perusahaan, pertambangan dan galian, serta pertanian. Pergerakan bisnis di kawasan kota seperti Jalan Hayam Wuruk, Jalan Gajah Mada, Jalan Sultan

Agung, dan Jalan PB Sudirman terus melaju pesat dengan berdirinya beragam usaha di jalan protokol itu.

Pertumbuhan hotel di Jember, lanjut dia, angka produk domestik regional brutonya (PDRB) tahun 2009 sebesar 4 persen, kemudian tahun 2010 meningkat sekitar 7 persen, dan tahun 2011 meningkat tajam mencapai angka 15 persen. Dengan semakin berkembangnya produktivitas dan seiring pertumbuhan beberapa pertokoan modern, serta perhotelan maka diprediksi angka pertumbuhan ekonomi di Jember tahun depan akan meningkat.

Membaiknya perekonomian global yang dibarengi stabilnya kondisi perekonomian domestik yang ditandai dengan terkendalinya tingkat inflasi, memengaruhi pertumbuhan ekonomi Jember. "Pada kurun waktu 2010-2012, pertumbuhan ekonomi secara umum menunjukkan *ascending economic growth trend* atau tren pertumbuhan ekonomi yang terus menaik. Ekonomi Jember bahkan mengalami percepatan. Tahun 2010, angka pertumbuhan menjadi 6,04 persen. Tahun 2011, pertumbuhan mencapai 7 persen, dan pada 2012 lalu, sudah mencapai 7,35 persen. Pertumbuhan tahun 2012, lebih cepat dibanding Jatim yang mencapai 7,27 persen.

Dari kinerja ekonomi tersebut, struktur masih didominasi oleh tiga sektor utama, yakni pertanian 37,46 persen, sektor perdagangan, hotel, dan restoran 25,17 persen, dan sektor industri pengolahan 10,81 persen. Ketiganya memberikan kontribusi 73,44 persen. Sektor perdagangan, hotel, dan restoran mengalami percepatan pertumbuhan tertinggi yakni sebesar 10,66 persen. Sektor ini disusul sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 9,93 persen, sektor jasa sebesar 8,87 persen, sektor penggalian 4,29 persen, dan sektor pertanian hanya mengalami percepatan pertumbuhan 3,63 persen.

Sementara PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) per kapita tahun 2012 mencapai Rp 12.101.945. Lebih besar dibandingkan tahun 2011 yang mencapai Rp 10.839.754," kata Djalal. Artinya, ada peningkatan PDRB per kapita 11,74 persen. Di lain sisi, laju inflasi di Jember dalam kurun waktu 2008-2011 cenderung turun. Tahun 2008, inflasi Jember 11,10 persen, dan 2011 tinggal 4,93 persen. "Bila dibandingkan dengan tren pendapatan per kapita yang mencapai

11,74 persen, maka dapat diartikan bahwa rata-rata pertambahan pendapatan masyarakat Jember selalu lebih tinggi daripada rata-rata tingkat kenaikan harga yang berlaku di Jember," kata Djalal.

2) Keragaan Perekonomian di Kecamatan

Salah satu cara untuk melihat struktur perekonomian adalah dengan melihat perkembangan Produk Domestik Bruto (PDRB). Berikut adalah Produk Domestik Bruto (PDRB) pada 31 Kecamatan yang ada di Kabupaten Jember ;

Table 4.5 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten Jember

No	Kecamatan	2009	2010	2011	2012	2013
1	Kencong	253936911	259119296	272757154	287112794	295992571
2	Gumukmas	283932581	289727123	304975919	321027283	330955962
3	Puger	727513824	742361045	781432679	822560715	848000737
4	Wuluhan	586916205	598894087	630414829	663594556	684118099
5	Ambulu	658611152	672052196	707423364	744656172	767686776
6	Tempurejo	206048995	210254077	221320081	232968506	240173718
7	Silo	413056831	421486563	443670066	467021122	481465074
8	Mayang	102907990	105008153	110534898	116352524	119951056
9	Mumbulsari	135009181	137764471	145015232	152647613	157368673
10	Jenggawah	249900326	255000333	268421403	282548845	291287469
11	Ajung	208146794	212394687	223573355	235340374	242618942
12	Rambipuji	345660071	352714358	371278272	390819234	402906426
13	Balung	289728493	295641319	311201389	327580409	337711762
14	Umbulsari	247210234	252255341	265531938	279507303	288151859
15	Semboro	131491903	134175411	141237275	148670816	153268882
16	Jombang	118263238	120676773	127028182	133713876	137849357
17	Sumberbaru	470579885	480183556	505456375	532059342	548514785
18	Tanggul	383848273	391681912	412296749	433996578	447419153
19	Bangsalsari	549969482	561193349	590729841	621820885	641052459
20	Panti	209893090	214176622	225449076	237314817	244654451
21	Sukorambi	78602850	80206989	84428410	88872010	91620629
22	Arjasa	93044796	94943669	99940704	105200741	108454373
23	Pakusari	81201519	82858693	87219676	91810186	94649676
24	Kalisat	235685642	240495553	253153214	266477067	274718626
25	Ledokombo	172320847	175837599	185092210	194833905	200859696
26	Sumberjambe	148846144	151883820	159877706	168292322	173497239
27	Sukowono	185481416	189266751	199228159	209713852	216199847

28	Jelbuk	62726674	64006811	67375590	70921674	73115128
29	Kaliwates	1121291155	1144174648	1204394366	1267783543	1306993343
30	Sumpalsari	1143507447	1166844334	1228257193	1292902309	1332888978
31	Patrang	772869557	788642405	830149900	873842000	900868042

Sumber : BPS Jember 2014

Berdasarkan tabel 4.5 dapat diketahui bahwa Produk Domestik Regional Bruto sebagai salah variabel didalam menilai tingkat pertumbuhan perekonomian penduduk, dapat diketahui bahwa dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013, ada 5 kecamatan yang memiliki jumlah pendapatan terendah, yaitu Sukorambi, Arjasa, Pakusari, Jelbuk, dan Semboro. Sedangkan 5 kecamatan yang memiliki jumlah jumlah pendapatan tertinggi, yaitu Puger, Wuluhan, Umbulsari, Bangsalsari, dan Sumpalsari.

Produk domestik regional bruto yang terjadi pada 5 kecamatan terendah, dapat terjadi karena adanya faktor demografi dan profesi sebagian besar penduduknya serta jumlah penduduknya. Demografi yang ada pada wilayah ini, sebagian besar adalah persawahan, dan perkebunan. Profesi sebagian besar penduduknya adalah bertani. Jumlah penduduk yang ada pada daerah ini lebih sedikit dari pada kecamatan lainnya yang ada di Kabupaten Jember. Sedangkan pada daerah yang lokasinya memiliki jumlah produk domestik regional bruto tertinggi, dapat terjadi karena pada wilayah ini sebagian besar penduduknya telah berkerja sebagai pegawai kantor, pengusaha serta didukung oleh adanya faktor demografi sebagai pusat perkantoran atau wilayah yang menjadi konsentrasi bagi perrekonomian wilayah.

4.1.4 Penerimaan Pajak Bumi Bangunan

Pelunasan pajak bumi bangunan (PBB) di Kabupaten Jember, Jawa Timur, masih sekitar 50 persen dari target baku penerimaan PBB tahun 2012 sebesar Rp 25 miliar. Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Jember, Suprpto, mengatakan pendapatan PBB yang berhasil dipungut petugas hingga bulan November 2012 sebesar Rp12,5 miliar atau 50 persen. Realisasi pelunasan PBB tahun ini sangat rendah, sedangkan tahun lalu pelunasan PBB hingga akhir tahun hanya sebesar 70 persen. Menurut dia, petugas masih terus melakukan upaya

untuk menagih PBB masyarakat secara bertahap dan memberikan penyuluhan tentang pentingnya membayar PBB. Faktor yang menyebabkan rendahnya pelunasan PBB antara lain kesadaran masyarakat yang masih rendah dan kami akan melakukan evaluasi terkait kendala yang dihadapi masyarakat dalam menyetor PBB.

Selain itu, banyaknya rumah kosong khususnya di kawasan perkotaan yang ditinggal pemiliknya, sehingga membuat petugas pemungut sulit untuk menagih PBB dan hal tersebut mempengaruhi perolehan pendapatan PBB Jember. "Memang ada sebagian petugas 'nakal' yang tidak menyetorkan PBB masyarakat ke kas daerah, sehingga masih digunakan oleh petugas tersebut untuk kepentingan pribadi. Pendapatan PBB selama beberapa tahun terakhir tidak pernah mencapai 100 persen dari target penerimaan PBB setiap tahunnya, sehingga Pemkab Jember bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Jember untuk menagih tunggakan PBB tersebut.

Minimalnya penerimaan PBB setiap tahun yang masih di bawah target, dipandang tidak mempunyai hubungan positif alokasi dana desa (ADD). ADD tersebut salah satu tujuannya juga untuk merangsang petugas untuk lebih giat memungut PBB itu dengan cepat.

Tabel 4.6 Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

No	Kecamatan	2009	2010	2011	2012	2013
1	Kencong	441475313	459870118	474092905	499045164	514479550
2	Gemukmas	483581550	503730781	519310084	546642193	563548653
3	Puger	402268834	419030035	431989727	454726028	468789720
4	Wuluhan	457504902	476567606	491306810	517165063	533159859
5	Ambulu	810994267	844785695	870913087	916750618	945103730
6	Tempurejo	182464550	190067239	195945607	206258534	212637664
7	Silo	251816716	262309079	270421731	284654454	293458200
8	Mayang	155139904	161604067	166602131	175370664	180794499
9	Mumbulsari	76788683	79988211	82462073	86802182	89486786
10	Jenggawah	379809701	395635106	407871243	429338151	442616650
11	Ajung	307826523	320652628	330569720	347968126	358730027
12	Rambipuji	409360573	426417263	439605426	462742554	477054179
13	Balung	529014943	551057232	568100239	598000252	616495105
14	Umbulsari	583901692	608230930	627042195	660044416	680458161
15	Semboro	344364466	358712985	369807201	389270738	401310039

16	Jombang	366712354	381992035	393806222	414532865	427353469
17	Sumberbaru	310475871	323412365	333414810	350962958	361817482
18	Tanggul	338388945	352488484	363390190	382515990	394346381
19	Bangsalsari	465575715	484974704	499973921	526288338	542565297
20	Panti	215748540	224738063	231688724	243882868	251425637
21	Sukorambi	187245604	195047504	201079901	211663054	218209334
22	Arjasa	70441682	73376752	75646136	79627511	82090218
23	Pakusari	205890151	214468907	221101966	232738911	239937022
24	Kalisat	223438339	232748270	239946670	252575442	260387054
25	Ledokombo	221697938	230935352	238077682	250608086	258358852
26	Sumberjambe	241033603	251076669	258841927	272465187	280891945
27	Sukowono	177857168	185267883	190997818	201050334	207268386
28	Jelbuk	97919193	101999160	105153773	110688182	114111528
29	Kaliwates	2548651820	2654845646	2736954274	2881004499	2970107731
30	Sumbersari	1154967159	1203090791	1240299785	1305578721	1345957444
31	Patrang	632888304	659258650	679648093	715419045	737545407

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Jember

Berdasarkan tabel 4.4, dapat diketahui bahwa ada 5 kecamatan yang memiliki jumlah penerimaan pajak bumi dan bangunan terendah, yaitu Mayang, Mumbulsari, Sukorambi, Arjasa dan Jelbuk. Sedangkan yang memiliki jumlah penerimaan pajak bumi dan bangunan tertinggi, yaitu Ambulu, Umbulsari, Kaliwates, Summersari dan Patrang.

Penerimaan pajak bumi dan bangunan pada 5 kecamatan yang memiliki penerimaan pajak bumi dan bangunan terendah, dapat terjadi karena adanya adanya faktor demografi, sebagian profesi masyarakatnya dan besarnya jumlah penduduknya. Pada daerah ini, demografi yang ada yaitu sebagian besar adalah persawahan, sebagian profesi masyarakatnya yaitu berkerja sebagai petani dan berdagang, dan untuk jumlah penduduknya sebagai besar pada wilayah ini memiliki jumlah penduduk yang relatif lebih kecil daripada daerah yang lainnya. Sedangkan pada daerah yang memiliki penerimaan pajak bumi dan bangunan, didukung oleh adanya faktor demografi wilayah, dan profesi sebagian besar penduduknya dan jumlah penduduk dari wilayah tersebut. Pada wilayah yang memiliki jumlah penerimaan pajak bumi dan bangunan tertinggi, wilayahnya sebagian besar adalah sebagai wilayah perekonomian atau konsentrasi ekonomi dari suatu wilayah, sedangkan sebagian besar profesi penduduknya yaitu sebagai

pengusaha dan pegawai perkantoran, serta pada daerah ini jumlah penduduknya relatif lebih besar dan produktif.

4.2 Analisis Data

4.2.1 Uji Asumsi Klasik

Setelah memperoleh model, maka langkah selanjutnya yang dilakukan adalah menguji apakah model yang dikembangkan bersifat BLUE (*Best Linier Unbiased Estimator*) (Gujarati dalam Latan, 2013:14). Asumsi BLUE yang harus dipenuhi antara lain yaitu : model berdistribusi normal, data berdistribusi normal, tidak ada multikolinieritas, dan tidak adanya heteroskedastisitas. Pengujian asumsi klasik dilakukan pada model regresi linear berganda yang dijelaskan sebagai berikut ;

a. Uji Normalitas

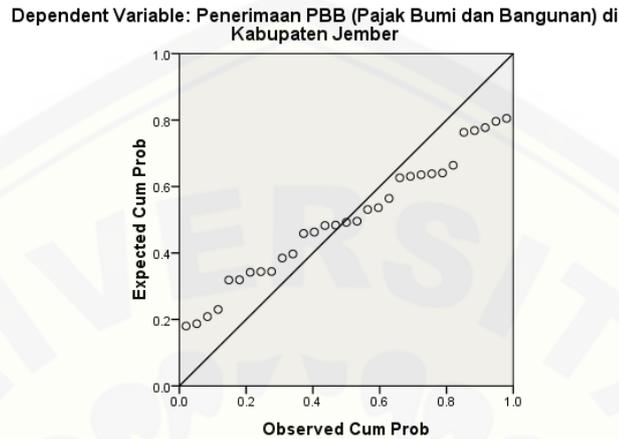
1) Uji Normalitas Normal P-Plot

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel independen, variabel dependen atau keduanya mempunyai distribusi normal ataukah mutlak regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati normal. Mendeteksi normalitas dengan melihat penyebaran data titik pada sumbu diagonal dari grafik (Latan, 2013:42). Dasar pengambilan keputusan antara lain :

- a) Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas;
- b) Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Adapun hasil pengujian disajikan pada Gambar 4.1, berikut ;

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Gambar 4.2 Hasil Uji Normalitas

Gambar 4.1, menunjukkan bahwa data berdistribusi normal, karena data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal sehingga dapat dinyatakan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas.

2) Uji Normalitas *Kolmogorov-smirnov Test*

Uji normalitas data dilakukan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas yang dilakukan terhadap sampel dilakukan dengan menggunakan *kolmogorov-smirnov test* dengan menetapkan derajat keyakinan (α) sebesar 5% (Latan, 2013:56).

Adapun hasil pengujian dapat disajikan sebagai berikut ;

Tabel 4.5 Hasil Uji Normalitas

<i>Test of Normality</i>	<i>Kolmogorov-Smirnov</i>			Keterangan
	Sig.	>	<i>Cutt off</i>	
Jumlah Penduduk (X_1)	0,210	>	0,05	Normal
PDRB (X_2)	0,099	>	0,05	Normal
PBB (Y)	0,072	>	0,05	Normal

Sumber : Lampiran 2

Berdasarkan tabel 4.5, dapat diketahui bahwa nilai probabilitas atau signifikansi untuk masing-masing variabel ada yang lebih besar dan ada yang lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat dinyatakan bahwa data dalam penelitian ini belum berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinieritas

Asumsi multikolinieritas adalah keadaan dimana terjadi hubungan linier yang sempurna atau mendekati sempurna antar variabel independen dalam model. Uji multikolinieritas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan linear dalam variabel independen dalam model. Ada atau tidaknya multikolinieritas dapat dilihat dari nilai *Variance Inflation Factor* (VIF). Latan (2013:61), menyatakan bahwa indikasi multikolinieritas pada umumnya terjadi jika VIF lebih dari 10, maka variabel tersebut mempunyai persoalan multikolinieritas dengan variabel bebas lainnya. Berikut ini disajikan hasil uji multikolinieritas ;

Tabel 4.6 Uji Multikolinieritas

<i>Test of Multikolinierity</i>	VIF		<i>Cutt off</i>	Keterangan
Jumlah Penduduk (X ₁)	1,218	<	10	Tidak terjadi multikolinieritas
PDRB (X ₂)	1,218	<	10	Tidak terjadi multikolinieritas

Sumber : Lampiran 2

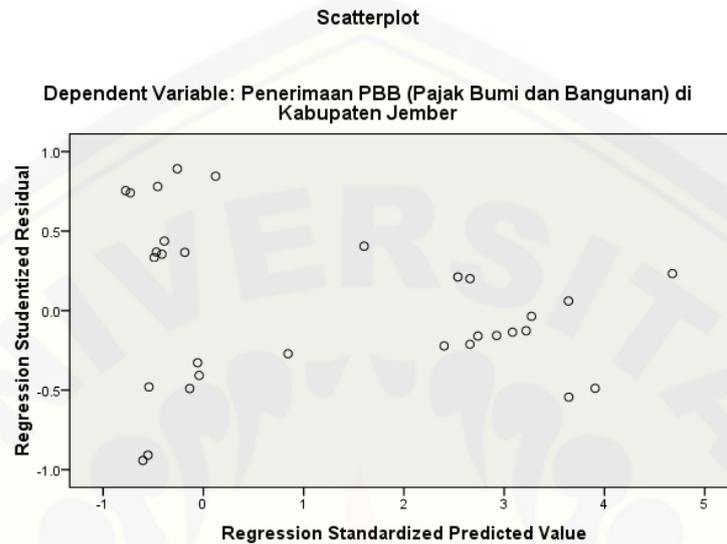
Tabel 4.6, menunjukkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas antar variabel *independen* karena menunjukkan nilai VIF kurang dari 10.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Cara memprediksi ada tidaknya heteroskedastisitas pada suatu model dapat dilihat dari pola gambar scatterplot model tersebut (Latan, 2013:39). Dasar pengambilan keputusan antara lain :

- a) Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik (point-point) yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka telah terjadi heteroskedastisitas;

- b) Jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Adapun hasil pengujian disajikan pada Gambar 4.2, sebagai berikut ;



Gambar 4.2 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Gambar 4.2, menunjukkan bahwa tidak adanya heteroskedastisitas, karena tebaran data tidak membentuk garis tertentu atau tidak terdapat pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka nol pada sumbu Y.

d. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi adalah keadaan dimana terjadinya autokorelasi antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lainnya atau melihat kebebasan data pada model regresi. Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi yang terjadi diantara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lainnya pada model regresi (Janie, 2012:32). Metode pengujiannya menggunakan Durbin Watson Tabel (Uji DW) dengan taraf signifikansi 5% ;

Tabel 4.7 Uji Autokorelasi

<i>Durbin Watson Test</i>	dL	dU	Keterangan
Tabel <i>Durbin Watson</i>	1,2969	1,5701	
<i>Durbin Watson</i>		1,656	Tidak terjadi
4 – dU		4 – 1,5701	autokorelasi positif dan
		1,5701 < 1,656 < 2,4299	negatif

Sumber : Lampiran 2

Tabel 4.7, menunjukkan bahwa nilai DW_{hitung} , $1,5701 < 1,656 < 2,4299$, maka dapat disimpulkan tidak terjadi autokorelasi positif dan negatif didalam model.

4.2.2 Analisis Deskriptif Statistik

Analisis deskriptif statistik adalah menggambarkan tentang ringkasan data-data penelitian seperti mean, standar deviasi, varian, modus, dll. Analisis deskriptif ini dapat digunakan untuk memberikan penjelasan dalam penelitian lanjutan untuk memberikan hasil yang lebih baik terhadap analisis regresi. Analisis deskriptif bersifat penjelasan statistik dengan memberikan gambaran data tentang jumlah data, minimum, maximum, mean, dan standar deviasi (Prayitno, 2010:12). Adapun hasil uji Analisis Deskriptif Statistik ;

Tabel 4.8 Hasil Analisis Deskriptif Statistik

Keterangan	N	<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>	<i>Mean</i>
Jumlah Penduduk (X_1)	31	1870507	2E7	4,80E6
PDRB (X_2)	31	7E7	1E9	3,71E8
PBB (Y)	31	8E8	3E9	4,906E8
<i>Valid N (listwise)</i>	31			

Sumber : Lampiran 2

Berdasarkan tabel 4.8, berkaitan dengan analisis deskriptif statistik dapat dilihat bahwa dengan jumlah data sebanyak 31, variabel penerimaan PBB (Y) mempunyai rata-rata sebesar Rp 480.000.000,-, dengan nilai minimal Rp 80.000.000,- dan maksimal Rp 3.000.000.000,-. Variabel jumlah penduduk (X_1) mempunyai rata-rata sebesar 4.800.000 orang, dengan nilai minimal 1.870.507 orang dan maksimal 2.000.0000 orang. Variabel PDRB (X_2) mempunyai rata-rata

sebesar Rp 371.000.000,-, dengan nilai minimal Rp. 70.000.000,- dan maksimal Rp 1.000.000.000,-

4.2.3 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi berganda berkaitan dengan studi ketergantungan suatu variabel *dependen* pada satu atau lebih variabel *independen* dengan tujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel *independen* terhadap variabel *dependen*. Hasil analisis regresi linear berganda antara variabel *independen* yaitu jumlah penduduk dan PDRB serta variabel *dependen* yaitu penerimaan PBB di Kabupaten Jember. Berikut pada Tabel 4.9 disajikan hasil analisis regresi linear berganda ;

Tabel 4.9 Hasil Regresi Linear Berganda

Variabel <i>Independent</i>	<i>Standardized</i> Coefficients B	t	t_{tabel}	Sig.	<i>a</i>	Keterangan
(Constant)	-1,711					
Jumlah Penduduk (X ₁)	0,441	3,770	> 2,048	0,018	< 0,05	Signifikan
PDRB (X ₂)	0,672	5,244	> 2,048	0,000	< 0,05	Signifikan
<i>Adjusted R Square</i> = 0,769				F. Hitung = 88,736 Sig. F = 0,000		

Sumber : Lampiran 2

Berdasarkan koefisien regresi, maka persamaan regresi yang dapat dibentuk adalah ;

$$Y = -1,711 + 0,441X_1 + 0,672X_2$$

- a. Nilai konstanta -1,711, menunjukkan bahwa jika tidak ada aktivitas pada jumlah penduduk dan PDRB maka nilai penerimaan PBB sebesar -1,711;
- b. Nilai slope 0,441 pada jumlah penduduk, menunjukkan bahwa setiap kenaikan kegiatan jumlah penduduk 1 satuan, maka hal tersebut akan meningkatkan penerimaan PBB sebesar 0,441, dan sebaliknya;

- c. Nilai slope 0,672 pada PDRB, menunjukkan bahwa setiap kenaikan kegiatan PDRB 1 satuan, maka hal tersebut akan meningkatkan penerimaan PBB sebesar 0,672, dan sebaliknya.

4.2.4 Uji Hipotesis

4.2.4.1 Uji t

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel *independen* berpengaruh terhadap variabel *dependen* secara signifikan secara parsial. Tabel distribusi t dicari pada $\alpha = 5\%$, dengan derajat kebebasan (df) $n-k-1$ atau $31-2-1 = 28$. Hasil analisis regresi berganda adalah untuk mengetahui jumlah penduduk dan PDRB serta variabel *dependen* yaitu penerimaan PBB di Kabupaten Jember. Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda (dalam hal ini untuk menguji pengaruh secara parsial) diperoleh hasil yang sebagai berikut ;

- a. Variabel jumlah penduduk (X_1) memiliki nilai $t_{3,770} > 2,048$ dan signifikansi $0,018 < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, yang berarti secara parsial variabel jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PBB di Kabupaten Jember;
- b. Variabel PDRB (X_2) memiliki nilai $t_{5,244} > 2,048$ dan signifikan $0,000 < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, yang berarti secara parsial variabel PDRB berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PBB di Kabupaten Jember. $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka jika ada peningkatan pada variabel PDRB maka akan meningkatkan penerimaan PBB.

4.2.4.2 Uji F

Uji F dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh jumlah penduduk dan PDRB terhadap variabel *dependen* yaitu penerimaan PBB di Kabupaten Jember secara simultan. Tabel distribusi F dicari pada $\alpha = 5\%$, dengan derajat kebebasan (df) df_1 atau $3-1 = 2$, dan df_2 $n-k-1$ atau $31-2-1 = 28$. Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda (dalam hal ini untuk menguji pengaruh secara simultan) diperoleh hasil, yaitu bahwa $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($88,736 > 3,34$) dan signifikansi ($0,000 < 0,05$), maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya variabel jumlah penduduk dan

PDRB secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PBB di Kabupaten Jember.

4.2.4.3 Koefisien Determinasi

Berfungsi untuk mengetahui besarnya proporsi atau sumbangan pengaruh variabel *independen* terhadap variabel *dependen* secara keseluruhan, maka dapat ditentukan dengan uji koefisien determinasi berganda (R^2). Dilihat dari nilai koefisien determinasi berganda, hasil analisis menunjukkan bahwa besarnya persentase sumbangan pengaruh variabel jumlah penduduk dan PDRB terhadap penerimaan PBB di Kabupaten Jember, dapat dilihat dari nilai *Adjusted R Square* (R^2) menunjukkan sebesar 0,769 atau 23,1% dan sisanya 40,3% dipengaruhi atau dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini, seperti besarnya pajak dan banyaknya usaha kena pajak.

4.3 Pembahasan

Hasil pengujian koefisien dari analisis regresi linear berganda, menunjukkan jumlah penduduk dan PDRB berpengaruh secara parsial terhadap penerimaan PBB di Kabupaten Jember. Hasil pengujian koefisien dari analisis regresi linear berganda, menunjukkan bahwa jumlah penduduk dan PDRB berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PBB di Kabupaten Jember. Berdasarkan hasil pengujian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang menyatakan, “ada pengaruh jumlah penduduk dan PDRB terhadap penerimaan PBB di Kabupaten Jember” adalah diterima. Hal ini mengindikasikan bahwa jika jumlah penduduk dan PDRB, memiliki nilai positif, maka akan memberikan pengaruh dalam meningkatkan penerimaan PBB di Kabupaten Jember.

4.3.1 Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan

Penelitian yang dilakukan, menunjukkan bahwa nilai koefisien variabel jumlah penduduk sebesar 0,441 atau 44,1% dengan arah positif. Jumlah penduduk

sebagai banyaknya jumlah perkembangan penduduk yang ada di Kabupaten Jember, dalam hal ini dirasa telah dapat mempengaruhi adanya peningkatan atau pengaruh pada penerimaan pajak bumi dan bangunan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012, jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Jember dapat diketahui berdasarkan jumlah penduduk yang tergolong relatif besar yaitu mencapai 4.800.000 orang pada tahun 2009 sampai dengan 2013. Pertumbuhan jumlah penduduk yang besar ini dapat memberikan sumbangan pengaruh atau peningkatan terhadap peningkatan penerimaan pajak bumi dan bangunan yang relatif tinggi, hal ini dapat disebabkan oleh adanya penduduk yang produktif didalam berusaha dalam meningkatkan pendapatan atau usahanya, sehingga dengan adanya penduduk yang produktif sangat membantu perkembangan pertumbuhan pada sektor usaha atau industri di Kabupaten Jember yang secara tidak langsung juga akan mempengaruhi adanya sumbangan pajak atau penerimaan pajak bumi dan bangunan untuk wilayah Kabupaten Jember yang relatif meningkat dengan jumlah yang relatif besar.

Menurut Widarjono (1999:73), jumlah penduduk oleh para perencana pembangunan dipandang sebagai asset modal besar pembangunan dan juga dipandang sebagai beban pembangunan. Sebagai asset apabila dapat ditingkatkan kualitas maupun keahlian/ ketrampilan sehingga akan meningkatkan produksi nasional. Jumlah penduduk yang besar akan menjadi beban jika struktur, persebaran, dan mutunya sedemikian rupa sehingga hanya menuntut pelayanan social yang tingkat produksinya rendah sehingga menjadi tanggungan penduduk yang bekerja secara efektif.

4.3.2 Pengaruh PDRB Terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan

Penelitian yang dilakukan, menunjukkan bahwa nilai koefisien variabel PDRB sebesar 0,672 atau 67,2% dengan arah positif. PRDB sebagai suatu pendapatan kotor yang masyarakat dalam suatu wilayah tertentu dalam 1 tahun yang jumlahnya relatif besar pada tahun 2009 sampai dengan 2013 yaitu mencapai rata-rata sebesar Rp 371.000.000,-, dengan adanya jumlah pendapatan masyarakat atau PDRB yang relatif besar maka akan memberikan pengaruh dalam peningkatan aktivitas usaha yang ada didalam suatu masyarakat sehingga dengan

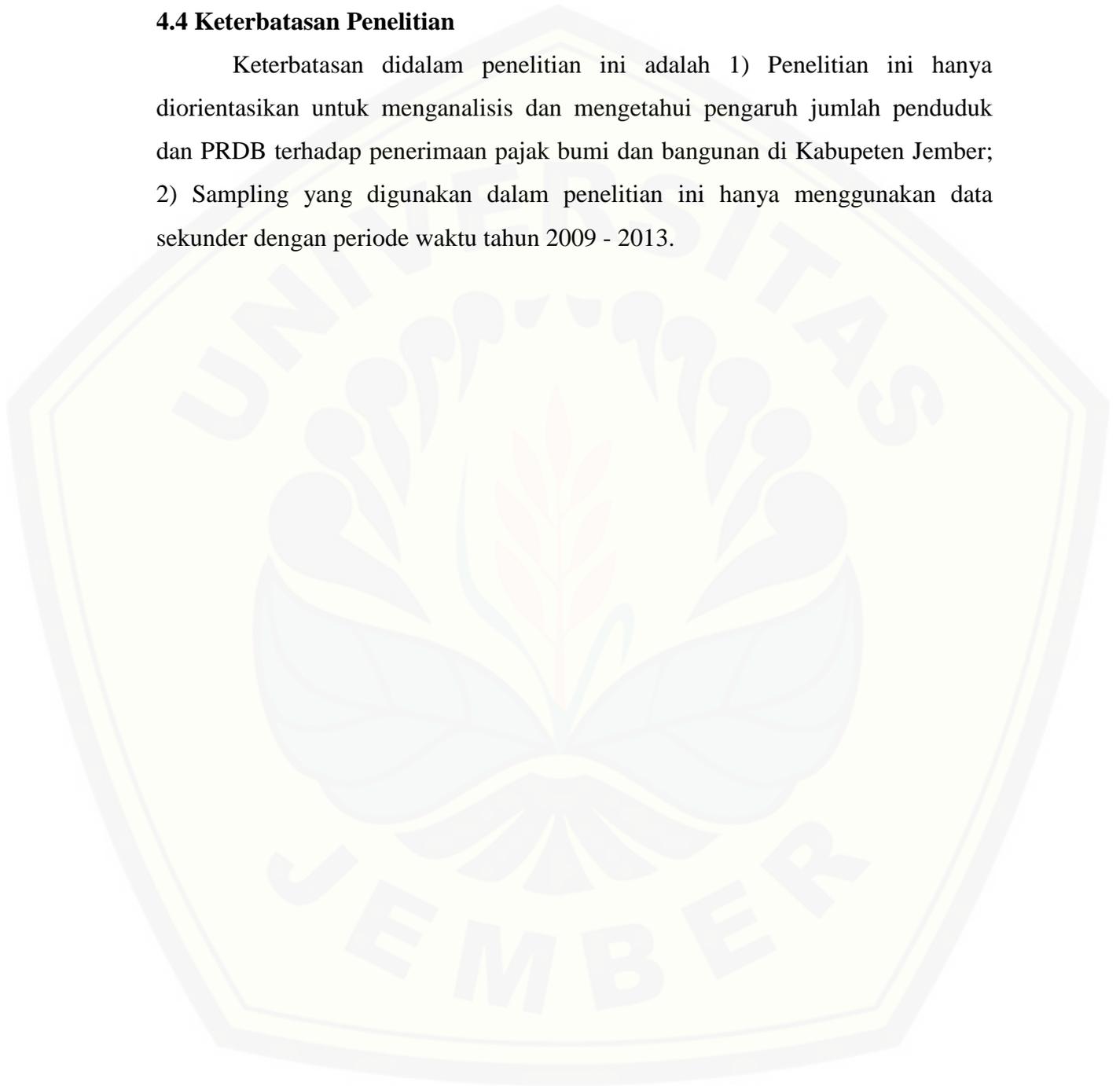
adanya pendapatan yang ada dimasyarakat yang nantinya juga akan menjadi suatu modal usaha didalam mengembangkan suatu usaha produktif yang nantinya juga akan memberikan pengaruh dalam besarnya pendapatan yang akan memberikan sumbangan pengaruh pada pajak atau kewajibannya kepada pemerintah mengenai pajak yang harus dibayarkan oleh masyarakat terhadap besarnya pendapatan atau usaha yang sedang produktif yang ada dimasyarakat. Semakin besar jumlah PDRB di Kabupaten Jember, secara tidak langsung perputaran permodalan yang ada dimasyarakat juga relatif besar dan dapat mengembang, semakin besar perkembangan suatu usaha masyarakat didalam suatu wilayah tentunya akan memberikan pengaruh dalam meningkatkan kewajiban pajak yang akan memberikan kontribusi terhadap besarnya penerimaan pajak bumi dan bangunan yang ada di Kabupaten Jember.

Menurut Wijaya (1990:262), pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dapat dicerminkan melalui nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dimana PDRB secara agresif menunjukkan kemampuan daerah tertentu dalam menghasilkan pendapatan atau balas jasa kepada faktor produksi yang ikut berpartisipasi dalam proses produksi didaerah tersebut. PDRB diartikan sebagai total nilai produksi barang dan jasa yang diproduksi di wilayah tertentu dalam kurun waktu tertentu (satu tahun). Hal ini menunjukkan besarnya nilai tambah produksi yang dihasilkan dari berbagai sektor yang melakukan usahanya di suatu daerah tanpa mementingkan faktor produksi yang dipakai. Sedangkan menurut Elfianti (2011:14), peningkatan PDRB dapat juga diartikan sebagai peningkatan jumlah output yang tentunya dapat berpengaruh terhadap pendapatan perkapita yang kemudian akan mempengaruhi kemampuan masyarakat dalam membayar pungutan, baik itu pajak, retribusi maupun pungutan-pungutan lain yang diterapkan oleh pemerintah daerah. Besarnya kapasitas pajak dan retribusi suatu daerah penting untuk menetapkan target penerimaan yang lebih akurat dan sangat diperlukan untuk mengukur kinerja administrasi penerimaan daerah yang tujuannya digunakan sebagai perencanaan penerimaan daerah yang lebih baik. Potensi pajak dan retribusi daerah dapat direfleksikan oleh aktifitas ekonomi suatu

daerah yang tergambar pada data PDRB, dimana PDRB menunjukkan total nilai tambah (produk akhir) yang dihasilkan oleh suatu daerah.

4.4 Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan didalam penelitian ini adalah 1) Penelitian ini hanya diorientasikan untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh jumlah penduduk dan PRDB terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Jember; 2) Sampling yang digunakan dalam penelitian ini hanya menggunakan data sekunder dengan periode waktu tahun 2009 - 2013.



BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan pada penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut ;

- a. Jumlah penduduk berpengaruh terhadap penerimaan PBB di Kabupaten Jember dengan arah positif. Semakin besar jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Jember akan memberikan pengaruh terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan, hal ini disebabkan karena jumlah penduduk yang produktif akan membantu peningkatan penerimaan pajak bumi dan bangunan;
- b. PDRB berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PBB di Kabupaten Jember dengan arah positif. Semakin besar PDRB yang ada di Kabupaten Jember akan memberikan pengaruh dalam meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan, hal ini disebabkan karena setiap sektor usaha akan memberikan kontribusi terhadap pajak yang diberikan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, maka dapat disarankan sebagai berikut ;

- a. Pihak Pemerintah Kabupaten Jember diharapkan dapat lebih mengembangkan adanya kemampuan dan produktifitas penduduknya, maka diharapkan penduduk yang ada dapat memberikan sumbangan dalam meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Jember;
- b. Pihak Pemerintah Kabupaten Jember diharapkan dapat lebih mengembangkan adanya pertumbuhan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang ada di Kabupaten Jember, maka diharapkan pertumbuhan ekonomi wilayahnya akan meningkat sehingga akan mendukung peningkatan dan kontribusi penerimaan sumbangan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Jember.